



# RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

**2024**



**PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI BARAT**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis 2023-2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja disusun dalam rangka memberikan arah/pedoman rencana tindak lanjut Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Kerja ini, saya sangat berharap semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai acuan dan panduan bagi seluruh aparatur lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Mamuju, 24 Juli 2023

Sekretaris Daerah,



Dr. Muhammad Idris, M.Si

Pangkat : Pembina Utama

NIP. : 19641115 199303 1 001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah .....	67
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah .....	71
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 .....	85
2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	142
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH .....	146
3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah .....	146
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH .....	151
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2024 .....	151
BAB V. PENUTUP .....	153
5.1 Kaidah Pelaksanaan .....	153
5.2 Penutup.....	153
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Belanja Daerah di Sekretariat Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2022.....	6
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) .....	7
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ..	69
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 .....	86
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah.....	150

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Tabel T-C33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Barat

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap kepala satuan perangkat daerah berkewajiban menyusun rencana kerja satuan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun Rencana Strategi Sekretariat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat setiap tahun anggaran diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah perlu diawali dengan menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah mengingat bahwa :

- a. Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RENSTRA-OPD hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- b. Rencana Kerja OPD memuat kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- c. Rancangan Renja OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antara pemangku kepentingan dalam rangka menentukan prioritas sub kegiatan yang mengarah terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat dan wilayah.
- d. Rancangan Renja OPD akan digunakan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD, karena Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar rancangan RENJA-OPD dan antar RKPD Kabupaten/Kota.
- e. Rancangan Renja OPD walaupun penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RKPD namun tetap bahwa RENJA-OPD sebagai bahan dalam rangka penyusunan rancangan RKPD dan rancangan akhir RKPD.

Selain itu RENJA-OPD juga merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD), yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan



dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan. Kejelasan dan logisnya kegiatan yang sesuai dengan TUPOKSI disertai alokasi biayanya yang tepat dan terarah dengan memperhatikan pelayanan publik, harus tertuang dalam RENJA-OPD, karena RENJA- OPD dalam pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan suatu dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);



- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
- o. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :





a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 kedalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan. Lebih jauh lagi penyusunan renja sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran yang akan dilaksanakan, serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 adalah :

- a. Menyediakan acuan/pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan RPD Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Menyediakan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
- c. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Memberikan pedoman Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
- e. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 adalah Sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan (2) Dasar Hukum (3) Maksud dan Tujuan (4) Sistematika Penulisan

#### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, memuat uraian kinerja pelayanan OPD, permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai



proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku kepentingan.

### **BAB III Tujuan dan Sasaran**

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja OPD yang memuat perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan**

Bab ini menguraikan tentang Program kegiatan dan sub kegiatan memuat penjelasan mengenai faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan, tabel rencana program kegiatan dan sub kegiatan (perumusan program kegiatan dan sub kegiatan).

### **BAB V Penutup**

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dibagi menjadi 3 (tiga) Asisten yang menaungi 6 (enam) biro yaitu 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang mengkoordinasikan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Biro Hukum; 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan 3) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan Biro Organisasi dan Biro Umum.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilakukan dengan melihat capaian program dan kegiatan serta realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Ringkasan jumlah anggaran belanja di sekretariat daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Belanja Daerah di Sekretariat Daerah  
Triwulan IV Tahun Anggaran 2022

No	Biro	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Biro Tata Pemerintahan dan Kesra	30.279.747.358	28.845.814.077	1.433.933.281	95.30
2	Biro Hukum	2.964.779.401	2.429.178.037	535.601.364	81.93
3	Biro Perekonomian dan Adm. Pembangunan	1.860.752.733	1.832.365.862	28.386.871	98.59
4	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.108.305.809	3.067.180.232	41.125.577	98.68
5	Biro Organisasi	2.508.689.402	2.497.659.694	11.029.708	99,56
6	Biro Umum	99.778.522.953	98.680.449.052	1.098.073.901	98,90

Dari enam biro tersebut jika diakumulasi maka besaran pagu anggaran Sekretariat Daerah adalah 140.500.797.656 dengan realisasi sebesar 137.352.646.954 dan menyisakan anggaran 3.148.150.702 sehingga persentase capaian kinerja anggaran sebesar 97,76 %. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 berjumlah 8 Program dan 30 Kegiatan. Capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 masing-masing biro dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 2) :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023(tahun berjalan)\* Provinsi Sulawesi Barat  
 Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Nama OPD : Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pendukung										
1	01	Bidang Urusan Pemerintahan									
1	001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	75,50	0,00	70,00	70,00	100,00	72,60	142,60	1,89



		1	0 1	0 1	01		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100,00	0,00	N/A	N/A	#VALUE!	100,00	#VALUE!	#VALUE!
		1	0 1	0 1	02		Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	70,00	0,00	52,00	52,00	100,00	60,00	112,00	1,60
		1	0 1	0 1	03		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	98,99	0,00	97,00	97,00	100,00	98,23	195,23	1,97
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	23,00	0,00	22,40	22,40	100,00	23,00	45,40	1,97
		1	0 1	0 2			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17,50	0,00	15,80	15,80	100,00	17,00	32,80	1,87
		1	0 1	0 2	01		Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10,00	0,00	9,20	9,20	100,00	9,50	18,70	1,87
		1	0 1	0 2	02		Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6,50	0,00	5,80	5,80	100,00	6,00	11,80	1,82
		1	0 1	0 2	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3	3	3	100	2	8,00	400,00



					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	9	1	1	100	1	11,00	1100,00
		1	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	9	1	1	100	1	11,00	1100,00
		1	0	0	01 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	15	1	1	100	1	17,00	1700,00
		1	0	0	02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	10	1	1	100	1	12,00	1200,00
		1	0	0	03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	1	1	1	100,00	2	4,00	200,00
		1	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1	1	1	100,00	4	6,00	150,00
		1	0	0	01 <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan</b>	<b>100</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



							<b>dan Kesejahteraan Rakyat</b>									
		1	0 1	0 3	02		<b>Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>					<b>#DIV/0!</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		1	0 1	0 3	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	0	0	0		<b>#DIV/0!</b>	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	0	0	0		<b>#DIV/0!</b>	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3	03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	0	1	0		0	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1		100	1	3,00	300,00
		1	0 1	0 3		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	0	0	0		<b>#DIV/0!</b>	1	1,00	100,00



		1	0	0	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	2	3	3	100	3	8,00	266,67
		1	0	0		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0	0	01	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>4</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
		1	0	0	02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0	0	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0	0		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0	0	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00





		1	0	0	01	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>					<b>#DIV/0!</b>	<b>89</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>
		1	0	0	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	0	0	0		#DIV/0!	2	2,00	100,00
		1	0	0	03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	74	1	54	54		100	74	129,00	174,32
		1	0	0		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	0	0	0		#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0	0	01	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	0	0	0		#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0	0	02	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	0	0	0		#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0	0		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	0	1	1		100	1	2,00	200,00
		1	0	0	01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	0	0	0		#DIV/0!	4	4,00	100,00



		1	0	0	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	5	35	5	5	100	5	45,00	900,00
		1	0	0	03	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>87</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>
		1	0	0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0	0	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	0	0	0	#DIV/0!	3	3,00	100,00
		1	0	0	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1614	2	2	100	1	1617,00	161700,00
		1	0	0	03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100	2	6,00	300,00
		1	0	0		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0	0	02	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	40	40	40	100	1	81,00	8100,00
		1	0	0	03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76	98	2	2	100	76	176,00	231,58



		1	0	0		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0	0		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0	0	01	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>7</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
		1	0	0	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0	0	03	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0	0		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	3	5	166,67	1	6,00	600,00
		1	0	0	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0	0	2	#DIV/0!	1	3,00	300,00
		1	0	0	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	5	5	5	100,00	1	11,00	1100,00



		1	0	0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	3	3	100,00	2	7,00	350,00
		1	0	0	02	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
		1	0	0	03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0	0		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>28</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>
		1	0	0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	10	5	5	100,00	1	16,00	1600,00
		1	0	0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00



		1	0 1	0 3	03	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6	0	0	0	#DIV/0!	6	6,00	100,00
		1	0 1	0 3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	0	0	0	#DIV/0!	9	9,00	100,00
		1	0 1	0 3	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	2	2	2	100	5	9,00	180,00
		1	0 1	0 3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	2	2	2	100	6	10,00	166,67
		1	0 1	0 3	01	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>100</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>15</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
		1	0 1	0 3	02	<b>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>	<b>Tersedianya Dokumen Tugas Pemerintahan</b>	<b>5</b>	<b>58</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>	<b>5</b>	<b>65,00</b>	<b>1300,00</b>
		1	0 1	0 3	03	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3		Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2	2	1	1	100,00	2	5,00	250,00



		1	0	0	01	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2	56	1	1	100,00	2	59,00	2950,00
		1	0	0	02	<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>83,33</b>	<b>7</b>	<b>21,00</b>	<b>300,00</b>
		1	0	0	03	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2	7	2	2	100,00	2	11,00	550,00
		1	0	0		Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	2	0	1	0	0	2	2,00	100,00
		1	0	0	01	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3	2	3	3	100	3	8,00	266,67
		1	0	0	02	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50,000</b>	<b>3</b>	<b>7,00</b>	<b>233,33</b>
		1	0	0	03	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1	2	2	2	100,00	1	5,00	500,00
		1	0	0		Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1	0	1	0	0	1	1,00	100,00
		1	0	0	01	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1	0	1	0	0	1	1,00	100,00
		1	0	0	02	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>459</b>	<b>659,00</b>	<b>659,00</b>



		1	0	0	03	<b>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>453</b>	<b>653,00</b>	<b>653,00</b>
		1	0	0		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	300	5	913	913	100	450	1368,00	456,00
		1	0	0	01	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	3	3	3	3	100	3	9,00	300,00
		1	0	0	02	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>	<b>Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>13,00</b>	<b>433,33</b>
		1	0	0	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	6	1	1	100	1	8,00	800,00
		1	0	0		Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1	1	1	1	100	1	3,00	300,00
		1	0	0	01	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	0	1	1	100	1	2,00	200,00
		1	0	0	02	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>



							<b>Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>								
		1	0 1	0 3	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	1	1	0	0	1	2,00	200,00
		1	0 1	0 3		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1	1	1	1	100	1	3,00	300,00
		1	0 1	0 3	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1	0	1	0	0	1	1,00	100,00





**Nama OPD : Biro Hukum**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> ) Tahun 2024	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01	SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Hukum	69,50	60,10	66,45	68,25	102,71	69	197,35	283,96
			Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100,00	100	300	300,00
			Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Hukum	4,15	45	95,00	97,00	102,11	4,00	146	3518,07
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Hukum	100,00	98,73	100,00	81,93	81,93	100,00	280,66	280,66
4	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,50		22,00	21,80	99,09	22,50	44,30	173,73



							Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Hukum	19,50		19,00	18,25	96,05	19,50	37,75	193,59
							Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Hukum	9,50		8,10	7,75	95,68	8,50	16,25	171,05
							Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Hukum	5,00		21,00	20,75	98,81	21,50	42,25	845,00
4	0 1	0 1	1	0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100	2	6	300,00
4	0 1	0 1	1	0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	300,00
4	0 1	0 1	1	0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	300,00
4	0 1	0 1	1	0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	300,00
4	0 1	0 1	1	0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	300,00



4	0	0	1	0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	100	2	6	300,00
4	0	0	1	0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4	12	300,00
4	0	0	1	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Biro Hukum	99,00	98,73	98,50	81,93	83,18	99,00	279,66	2,82
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Hukum	100	24,27	25	24,68	98,72	25,00	73,95	0,74
4	0	0	1	0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0	0	1	0	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0	0	1	0	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0	0	1	0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1	1	1	100	1	3	3,00





4	0	0	1	0	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0	0	1	0	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0	0	1	0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	0	0	1	0	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	2	2	2	100	2	6	3,00
4	0	0	1	0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60	0	0	0	0	36	36	0,60
4	0	0	1	0	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0	0	1	0	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	0	0	1	0	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1	1	100	1	3	3,00



4	0	0	1	0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	0	0	0	0	1	1	1,00
4	0	0	1	0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	0	0	0	0	1	1	0,25
4	0	0	1	0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	0	0	0	0	1	1	0,20
4	0	0	1	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	0	0	1	0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0	1	1	1,00
4	0	0	1	0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	10	10	10	100	10	30	30,00
4	0	0	1	0	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100	2	6	3,00
4	0	0	1	0	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1	0	0	0	0	0	0	0,00



								Undangan yang Disediakan											
4	0	0	1	0	06	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	0	18	18	100	5	23	7,67				
4	0	0	1	0	07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	50	50	50	100	75	175	2,19				
4	0	0	1	0	09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00				
4	0	0	1	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00				
4	0	0	1	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	300	3,00				
4	0	0	1	0	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00				
4	0	0	1	0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00				
4	0	0	1	0	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00				



4	011107	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	0	9	9	100	15	24	4,00
4	011107	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	011107	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	011108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	011108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100	1	3	3
4	011109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	011109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	11	11	11	100	11	33	3,00





4	0	0	1	0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	13	13	13	100	13	39	3,00
4	0	0	1	0	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	0	10	10	100	10	20	2,00
4	0	0	1	0	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6	6	6	100	6	18	3,00
0	0	0				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100	100	100	118,5	118,5	100	318,5	3,19
0	0	0	1	0		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	100	100	100	123	123	100	323	3,23
0	0	0	1	0	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	40	47	35	58	165,71	40	145	3,63
0	0	0	1	0	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	520	504	500	491	98,20	500	1495	2,88



040510103	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	600	709	570	673	118,07	600	1982	3,30
040510104	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	141	243	135	239	177,04	141	623	4,42
0405102	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	100	100	100	114	114	100	314	3,14
040510201	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	2	2	1	3	300	2	7	3,50
040510202	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	2	6	6	6	100	2	14	7,00

**Nama OPD : Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2024	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)



1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	0				BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	65	58,87	59,85	68,50	100	62	0	0,00
						Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
						Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	75	52	52	78	100	65	0	0,00
						Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	95	80,32	94	98,47	100	95	0	0,00
4	0	0	1	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	22	20,61	22	20	100	24,08	0	0,00
						Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	22	14,38	22	20	100	20,50	0	0,00



							Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	9,80	8,79	9	9,75	100	10,80	0	0,00
							Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	7,50	4,09	7	18,75	100	8,85	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4	6	6	100	2	1	50,00
4	0 1	0 1	1	0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00



4	0 1	0 1	1	0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2	2	30	30	100	2	1	50,00	
4	0 1	0 1	1	0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	0 1	0 1	1	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	95	0	0	0	0	95	0	0,00	
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	0	0	0	0	100	0	0,00	



4	0 1	0 1	1	0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 2	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3	0	0	0	0	3	1	33,33	
4	0 1	0 1	1	0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	0	0	0	0	0	0	0,00	



4	0 1	0 1	1	0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	0	0	0	0	100	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 3	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0	0	1	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	100	100	100	100	100	98,04	98,04
4	0 1	0 1	1	0 5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	0	0	0	0	0	0	0,00



4	0	0	1	0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50	0	0	0	0	47	47	100,00
4	0	0	1	0	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	4	4	100	4	3	75,00
4	0	0	1	0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	1	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	100	100	100	100	100	63,33	63,33





4	0	0	1	0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	4	1	1	100	1	0	0	0,00
4	0	0	1	0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	18	1	1	100	1	0	0	0,00
4	0	0	1	0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	20	1	1	100	1	0	0	0,00
4	0	0	1	0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	100	1	1	100	1	0	0	0,00
4	0	0	1	0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	20	1	1	100	1	0	0	0,00
4	0	0	1	0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30	120	120	100	25	19	76,00	
4	0	0	1	0	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00



4	0	0	1	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	0	0	0	1	1	100,00	
4	0	0	1	0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	0	0	1	0	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	0	0	1	0	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	0	0	1	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro	100	0	0	0	0	0	0	0,00	



							Perekonomian dan Administrasi Pembangunan										
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0	0	0	0	1	0	0,00		
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	100	100	100	100	61	30	30,43		
4	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	0	0	0	0	0	0	0,00		
4	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	25	13	13	100	12	6	50,00		
4	01	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	0	0	0	0	0	0	0,00		
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	0	10	10	100	2	1	50,00		



4	01	01	1	09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	15	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	8	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	06				<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	90	96,88	100	100	100	100	19,17	21,30	
4	01	06	1	01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	90	93,75	100	100	100	100	20,00	22,22	
4	01	06	1	01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	12	12	4	4	100	5	1	20,00	
4	01	06	1	01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	6	3	4	4	100	5	1	20,00	
4	01	06	1	02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Pengelolaan Kebijakan SDA	100	0	100	100	100	100	12,50	12,50	



4	0	0	1	0	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	10	0	0	0	0	4	0	0,00
4	0	0	1	0	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	10	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12	0	4	4	100	4	1	25,00
4	0	0	1	0		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan BUMD dan BLUD	100	100	100	100	100	100	25,00	25,00
4	0	0	1	0	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	14	12	12	12	100	4	1	25,00



4	01	06	1	03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah	14	4	4	4	100	4	1	25,00
4	01	06	1	03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	12	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	06	1	03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	12	5	1	1	100	4	1	25,00
4	01	06	1	03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	12	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	08				PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100	33,71	100	100	100	100	20	20,00
4	01	08	1	01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100	62,16	100	100	100	100	20	20,00



4	0	0	1	0	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12	0	4	4	100	0	0	0,00
4	0	0	1	0	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12	6	4	4	100	5	1	20,00
4	0	0	1	0	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	13	17	4	4	100	5	1	20,00
4	0	0	1	0	2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	100	5	100	100	100	100	20	20,00
4	0	0	1	0	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	13	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	13	2	4	4	100	5	1	20,00
4	0	0	1	0	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Teknis Pembangunan Daerah	12	0	1	1	100	0	0	0,00

**Nama OPD : Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Target program dan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
------	---	--	------------------------	------------------	--	--------------------	--



1	2	3	4	5	6			9	Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01	SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	60	0	50	74,25	148,50	55	129,25	2,15
			Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	70	30	50	81	162	60	171	2,44
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	96,37	93,32	94,4	98,56	104,41	94,50	286,38	2,97





4	0	0	1	0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	22,50	0	21	26,50	126,19	22	48,50	2,16
							Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	22,50	0	21	24,00	114,29	22	46,00	2,04
							Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	9,50	0	9	11,25	125,00	9,50	20,75	2,18
							Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7	0	6	12,50	208,33	6,50	19,00	0,93
4	0	0	1	0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4	4	4	100	2	10	5,00
4	0	0	1	0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0	0	0	0	1	0	0,00
4	0	0	1	0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	0	0	0	0	1	0	0,00
4	0	0	1	0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	0	0	0	1	0	0,00



4	0 1	0 1	1	0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0	0	0	0	1	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	4	4	4	100	2	10	5,00
4	0 1	0 1	1	0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4	12	3,00
4	0 1	0 1	1	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	97,00	93,32	100	98,68	98,68	96,00	288	2,97
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	0 1	0 1	1	0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00



4	0	0	1	0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	2	2	100	2	6	3,00
4	0	0	1	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	0	0	0	0	100	100	1,00
4	0	0	1	0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	1	0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	0	0	0	0	20	20	1,00
4	0	0	1	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	96,67	100	100,00	100,00	100	296,67	2,97
4	0	0	1	0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	30	30	30	100	30	90	3,00
4	0	0	1	0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	10	10	10	100	10	30	3,00



4	0	0	1	0	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40	40	40	40	100	40	120	3,00
4	0	0	1	0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	36	40	40	100	40	116	2,90
4	0	0	1	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100	100,00	100,00	100	300	3,00
4	0	0	1	0	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	0	0	0	0	4	4	1,00
4	0	0	1	0	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	0	0	0	0	20	20	1,00
4	0	0	1	0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	0	7	7	100	15	22	1,47
4	0	0	1	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	0	0	1	0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	4	4	100	4	4	1



4	0	0	1	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	0	0	1	0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	0	0	0	0	2	2	0,67
4	0	0	1	0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	7	7	7	100	7	21,00	1,91
0	0	0				<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	75,95	69,51	70,90	65,00	91,68	73,03	207,54	2,73
0	0	0	1	0		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur	100	100	100	100	100	100	300	3,00
0	0	0	1	0	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2	2	2	2	100,00	2	6	3,00



04	01	07	1	01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	4	4	100,00	4	12	3,00
04	01	07	1	01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	4	4	100,00	4	12	3,00
04	01	07	1	02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	0	100	100	100,00	100	200	2,00
04	01	07	1	02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4	4	4	4	100,00	4	12,00	3,00
04	01	07	1	02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	4	4	100,00	4	12	3,00
04	01	07	1	02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	4	4	100,00	4	12	3,00
04	01	07	1	03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	100	100	100	100,00	100,00	100	300,00	3,00
04	01	07	1	03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30	30	30	30	100	30	90	3,00



040710302	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	3	3	3	100	3	9	3,00
040710303	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3	3	3	3	100	3	9	3,00

**Nama OPD : Biro Organisasi**

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4011	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Lingkup Biro Organisasi	89	80	83	80	96%	86	246	276%
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Organisasi	100	100	100	100	100%	100	300	300%



							<b>Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Organisasi</b>	<b>75</b>	<b>37</b>	<b>55</b>	<b>94</b>	<b>171%</b>	<b>60</b>	<b>191</b>	<b>255%</b>
							<b>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Organisasi</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>102%</b>	<b>97</b>	<b>293</b>	<b>302%</b>
4	0 1	0 1	1	0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	28	26	25	25	98%	28	79	282%
							Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Organisasi	24	19	25	23	90%	22	63	264%
							Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	15	13	14	13	89%	15	40	275%
							Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Organisasi	18	6	16	21	128%	14	40	223%
4	0 1	0 1	1	0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	3	3	100%	2	7	350%
4	0 1	0 1	1	0 1	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	2	2	100%	2	6	300%





4	0 1	0 1	1	0 1	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4	4	100%	4	12	300%
4	0 1	0 1	1	0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Organisasi	100	100	100	100	100%	100	300	300%
4	0 1	0 1	1	0 5	00 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	0	0	0	-	2	2	100%
4	0 1	0 1	1	0 5	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	53	0	0	0	-	29	29	55%
4	0 1	0 1	1	0 5	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	0	10	10	100%	12	22	183%
4	0 1	0 1	1	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Organisasi	100	100	100	100	100%	100	300	300%
4	0 1	0 1	1	0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	10	10	100%	10	30	300%
4	0 1	0 1	1	0 6	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10	10	10	100%	10	30	300%



4	0	0	1	0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	300	300	300	300	100%	300	900	300%
4	0	0	1	0	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	80	80	80	80	100%	80	240	300%
4	0	0	1	0	00	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	60	60	60	60	100%	60	180	300%
4	0	0	1	0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	70	70	70	70	100%	70	210	300%
4	0	0	1	0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	10	10	10	10	100%	10	30	300%
4	0	0	1	0	00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1	100%
4	0	0	1	0	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	100	100	100	100	100%	100	300	300%



4	0	0	1	0	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	15	15	15	15	100%	15	45	300%
4	0	0	1	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	100	100	100	100	100%	100	300	300%
4	0	0	1	0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	2	2	100%	2	6	300%
4	0	0	1	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Lingkup Biro Organisasi	100	100	100	100	100%	100	300	300%
4	0	0	1	0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13	13	13	100%	13	39	300%
4	0	0	1	0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	0	0	0	-	5	5	100%
4	0	0				Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Minimal B+	33	33	33	33	100%	33	99	297%



							Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 10 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP	100	50	83	34	41%	100	184	184%
4	0 1	0 2	1	0 1		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada	85	65	75	75	100%	80	220	259%
							Indeks Kematangan Organisasi	46	0	37	37	101%	37	74	162%
4	0 1	0 2	1	0 1	00 01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
4	0 1	0 2	1	0 1	00 02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	6	6	6	100%	6	18	300%
4	0 1	0 2	1	0 1	00 03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	3	3	3	3	100%	3	9	300%
4	0 1	0 2	1	0 2		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada	65	10	40	50	125%	50	110	169%
							Nilai SAKIP Pemprov.	74	68	70	69	98%	70	207	279%
4	0 1	0 2	1	0 2	00 01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	8	8	8	8	100%	8	24	300%



4	0	0	1	0	00	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen )	7	7	7	7	100%	7	21	300%
4	0	0	1	0	00	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
4	0	0	1	0	00	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen )	30	20	20	20	100%	20	60	200%
4	0	0	1	0	00	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	3	3	3	3	100%	3	9	300%

**Nama OPD : Biro Umum**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)



		1				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>									
		1	0			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	101,6	0	24	17,1	71,25%	24,6	41,7	41,04%
		1	0	0			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	63,5	0	20	19,06	95,30%	20,5	39,56	62,30%
		1	0	0	01		Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	37,8	0	12	10,41	86,75%	12,3	22,71	60,08%
		1	0	0	02		Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	25,7	0	8	5,25	65,63%	8,2	13,45	52,33%
		1	0	0	03		Nilai Capaian Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	50,8	0	16	13	81,25%	16,4	29,4	57,87%
		1	0	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	6	6	7	100,00%	7	20	71,43%
		1	0	0	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-Biro Umum	4	1	1	1	100,00%	1	3	75,00%
		1	0	0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum	4	1	1	1	100,00%	1	3	75,00%
		1	0	0	03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-Biro Umum	4	1	1	1	100,00%	1	3	75,00%



					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum	4	1	1	1	100,00%	1	3	75,00%
		1	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro Umum	8	6	2	2	100,00%	2	10	125,00%
		1	0	0	01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	6	6	8	66,66%	7	21	70,00%
		1	0	0	03 <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	400	0	95	100	100,00%	100	200	50,00%
						Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD (Persen)	400	98	90	100	100,00%	100	298	74,50%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13440	300	3360	3360	93,00%	3360	7020	52,23%
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	109	0	100	100	100,00%	3	103	94,50%



					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Biro Umum	9950	0	12	12	100,00%	2400	2412	24,24%
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Biro Umum	4	12	12	12	100,00%	1	25	625,00%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro Umum	8	1	1	1	100,00%	2	4	50,00%
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20	0	100	100	100,00%	5	105	525,00%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Umum dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Umum	64	6	16	16	100,00%	16	38	59,38%
					<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	400	0	100	98,96	98,96%	100	198,96	49,74%
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Biro Umum	120	1	30	30	100,00%	30	61	50,83%





					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Biro Umum	16	0	4	4	100,00%	4	8	50,00%
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Biro Umum	16	0	0	0	0,00%	4	4	25,00%
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Biro Umum	24	0	3	3	100,00%	6	9	37,50%
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	288	0	12	12	100,00%	72	84	29,17%
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	8	0	12	12	100,00%	2	14	175,00%
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Umum	40	28	1	1	100,00%	1	30	75,00%
					<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	400	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%



						Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	4	0	0	0	0,00%	1	1	25,00%
						<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	400	0	100	99,34	99,34%	100	199,34	49,84%
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	31	21	575	575	100,00%	7	603	1945,16 %
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40	70	1	1	100,00%	10	81	202,50%
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	0	1	1	100,00%	1	2	50,00%
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	28	0	75	72	96,00%	7	79	282,14%
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	0				10	10	25,00%
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200	19	100	100	100,00%	50	169	84,50%



						<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	400	0	100	99,78	99,78%	100	199,78	49,95%
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	0	25	25	100,00%	4	29	181,25%
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	0	20	11	55,00%	4	15	93,75%
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	36	15	15	100,00%	2	53	662,50%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	15	15	15	100,00%	2	32	400,00%
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48	0	16	16	100,00%	12	28	58,33%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	320	750	596	79,47%	12	928	1933,33 %
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	20	1	1	100,00%	1	22	550,00%
						<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	400	0	95	95	100,00%	100	195	48,75%



					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18	5	5	5	100,00%	3	13	72,22%
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26	0				5	5	19,23%
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48	4	2	2	100,00%	10	16	33,33%
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	280	10	30	30	100,00%	70	110	39,29%
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	400	0	100	100	96,22%	100	200	50,00%
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	4865	100	100	100,00%	12	4977	10368,75%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	4	4	4	100,00%	12	20	41,67%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	0	1	1	100,00%	1	2	50,00%



					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	400	0	100	98,49	98,49%	100	198,49	49,62%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	80	17	20	20	100,00%	20	57	71,25%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	480	164	150	150	100,00%	120	434	90,42%
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	680	35	70	70	100,00%	170	275	40,44%
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	4	12	12	100,00%	12	28	58,33%
					<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Persen)	400	0	100	99,15	99,15%	100	199,15	49,79%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	2	2	2	100,00%	2	6	75,00%



						Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	0	5	5	100,00%	6	11	45,83%
						Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	2	2	2	100,00%	2	6	75,00%
						<b>Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah (Persen)	400	0	100	99,15	99,15%	100	199,15	49,79%
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20	0	40	40	100,00%	5	45	225,00%
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15	0	40	40	100,00%	5	45	300,00%
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	40	0	800	774	96,75%	10	784	1960,00 %
						<b>Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	Persentase Pengelolaan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan (Persen)	400	0	100	97,31	97,31%	100	197,31	49,33%
						Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	845	0	2000	1448	72,40%	200	1648	195,03%



					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3900	1500	1200	1070	89,17%	900	3470	88,97%
					Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	6200	0	2500	2500	100,00%	1400	3900	62,90%
					<b>Fasilitasi Keprotokolan</b>	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan (Persen)	400	0	100	99,02	99,02%	100	0	0,00%
					Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4600	0	1800	1677	93,17%	1000	2677	58,20%
					Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48	43	100	100	100,00%	12	155	322,92%
					Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	4070	0	1800	1800	100,00%	900	2700	66,34%

Mamuju, 24 Juli 2023

Sekretaris Daerah  
Provinsi Sulawesi Barat

**Dr. Muhammad Idris, M.Si**  
Nip : 196411151993031001



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan dan tugas fungsi Sekretariat Daerah tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun memberikan pelayanan kepada unsur pimpinan, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Pada tataran Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perencanaan lingkup Sekretariat Daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan asset lingkup Sekretariat Daerah.
3. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi lingkup Sekretariat Daerah.
4. Belum optimalnya manajemen sumber daya aparatur lingkup Sekretariat Daerah.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Sekretariat Daerah.
6. Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai pasca bencana gempa bumi.

Selain permasalahan umum di atas, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas aparatur Sekretariat Daerah belum terpenuhi secara optimal berdasarkan analisis beban kerja sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja organisasi.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan budaya kerja pada setiap unit belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
3. Sarana dan prasarana pelayanan Sekretariat Daerah belum terpenuhi secara maksimal.



Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Kurangnya sinergitas dengan lembaga pemerintahan lainnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
2. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat dinamis mempengaruhi perubahan tata kelola pemerintahan.
3. Kurangnya kolaborasi dengan pihak eksternal dalam penyelesaian permasalahan pemerintahan dan masyarakat.

a. Tantangan

Tantangan merupakan gambaran kondisi yang dapat dilihat berasal dari eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk tantangan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih terdapat kompetensi sumberdaya aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku.
2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja normatif aparatur pemerintah menjadi pola pikir dan budaya kerja konstruktif yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome).
3. Kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Peluang

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun peluang yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang cukup potensial;
2. Komitmen pimpinan cukup tinggi dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah.



**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Barat**

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Fasilitas Kerjasama Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Fasilitas dan Pembinaan di bidang Keagamaan			100	100	100	100	100	100	100	100	

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Hukum

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tingkat Reformasi Hukum			60	70	80	90	-	-	80	90	



Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tingkat Kualitas Kebijakan			60	70	80	90	-	-	80	90	

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tingkat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			70,90	73,03	73,03	75,95	70,90	72,00	73,03	75,95	

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Organisasi

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indeks Kelembagaan			2	B	B+	B+	-B	B	B+	B+	

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Umum

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indeks Kepuasan Layanan			N/A	100	100	100	N/A	-	100	100	



### 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Program pemerintah pusat dalam upaya pembentukan IKN menjadi semangat baru bagi Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian dalam mendukung setiap proses pembangunannya. Terlebih jika Ibukota Negara terbentuk sesuai dengan rencana yang berlokasi di Kalimantan Timur, maka secara geografis kedekatan IKN dengan Provinsi Sulawesi Barat dapat memberikan manfaat yang besar bagi percepatan pembangunan kedua Provinsi. Tentunya Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Timur dapat membangun program kerja sama antar daerah baik dari segi pembangunan ekonomi, maupun aspek pembangunan lainnya. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran yang cukup bagus dalam upaya fasilitasi kerjasama sama daerah serta badan usaha baik yang bersifat makro maupun mikro, erumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pemanfaatan BUMD dan BLUD dalam konteks kekinian serta fasilitasi perumusan kebijakan ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Provinsi Sulawesi Barat mempunyai banyak potensi yang dapat dipromosikan menjadi produk yang menarik para investor maupun wisatawan mancanegara. Untuk itu dibutuhkan perhatian yang lebih serius dalam mengelola atau menata daerah kewilayahan beserta sumber daya yang ada sehingga menjadi nilai jual yang dapat dibanggakan daerah. Selain dengan meningkatkan potensi sumber daya daerah dalam menopang pembangunan IKN, dibutuhkan pula pembenahan dan peningkatan pengelolaan mutu pelayanan. Kedekatan IKN dengan Provinsi Sulawesi Barat tentunya akan meningkatkan aktivitas pembangunan di segala bidang dan meningkatkan relasi yang tinggi. Relasi yang terbangun ini akan berefek pada intensitas pemanfaatan moda transportasi baik itu udara, laut maupun transportasi darat yang akan digunakan dalam berbagai pertemuan.

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan berbagai tugas dan fungsi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai unsur pendukung yang memiliki peran penting dibawah kepemimpinan sekretaris daerah yang dilimpahkan pada biro-biro. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat Daerah antara lain sinergi penyusunan kebijakan daerah, efektifitas pelaksanaan kebijakan daerah, akuntabilitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah, dan peningkatan manajemen umum di lingkup Sekretariat Daerah. Oleh karena itu terdapat isu-isu strategis yang perlu didorong dalam kurun waktu kedepan.

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban dalam kurun waktu 2023 – 2026, adalah sebagai berikut:

- a. Belum Optimalnya Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah:



1. Belum Optimalnya Penyusunan dan Penilaian LPPD.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas amanat yang diterima melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Penyusunan LPPD sesuai dengan ketentuan pasal 69 Undang Undang 23 tahun 2014 menjadi laporan kepada pemerintah pusat terkait pelaksanaan desentralisasi/ urusan yang telah diselenggarakan pemerintah daerah. Sehingga poin LPPD menjadi rapor yang menunjukkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Peran Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring penyusunan LPPD oleh OPD lingkup Provinsi Sulawesi Barat untuk menyusun LPPD Provinsi Sulawesi Barat serta penyusunan LPPD oleh seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat.

Sehingga untuk meningkatkan poin LPPD, upaya koordinasi untuk memastikan proses pembinaan, evaluasi dan monitoring bisa berjalan dengan baik hasil dimaksimalkan.

Dalam proses ini, pemahaman aparatur baik di internal selaku pendukung dalam proses pembinaan, pembinaan dan monitoring; maupun pemahaman aparatur di masing-masing instansi yang menyusun LPPD sangat penting untuk diperhatikan . Sebab ketersediaan dan pemahaman atas data yang dibutuhkan dalam menyusun LPPD ini berpengaruh secara langsung dalam upaya peningkatan poin LPPD.

2. Belum Optimalnya Fasilitasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Pembentukan daerah otonomi baru menjadi isu yang selalu muncul setiap tahunnya sebab aspirasi masyarakat terkait pembentukan daerah otonomi baru terus disuarakan. Namun upaya fasilitasi ini belum dapat dilakukan dengan maksimal sebab moratorium pemekaran daerah yang telah ditetapkan sejak tahun 2014 masih belum dicabut.

Di sisi lain fasilitasi pembentukan daerah otonomi baru tetap harus dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen terkait pembentukan daerah otonomi baru yang *urgent* untuk segera ditindaklanjuti sudah siap saat moratorium dicabut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembentukan kota Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat. Maka upaya antisipasi atas pencabutan moratorium harus terus dilakukan dengan memastikan kelengkapan data dan ketersediaan data serta dokumen yang dibutuhkan selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menyukseskan upaya pembentukan Kota Mamuju.

3. Belum Optimalnya fasilitasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD.

Isu strategi terkait fasilitasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD harus menjadi salah satu isu utama pada 2024 sebab Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pemilu Serentak akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November 2024.

Dalam proses fasilitasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD ini, koordinasi yang efektif diperlukan untuk memastikan proses pemilihan hingga pengambilan sumpah jabatan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hal ini termasuk pula seluruh kelengkapan administrasi yang disyaratkan untuk penetapan pejabat yang ditunjuk. Untuk mengantisipasi hal ini, maka segala sumber daya yang dibutuhkan harus sudah siap saat pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan.

4. Belum Optimalnya fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota. (2)

Dalam upaya fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintah, koordinasi menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi. Kemampuan SDM dalam melakukan diplomasi menjadi salah satu hal yang penting untuk dimiliki. Sebab dalam upaya fasilitasi ini, benturan kepentingan seringkali tidak dapat dihindarkan sehingga upaya untuk menemukan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak harus bisa terwujud.

Upaya fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melibatkan koordinasi yang intensif dengan pihak Kementrian Dalam Negeri serta masing-masing kabupaten/kota serta kecamatan yang berbatasan baik dalam lingkup batas antarprovinsi maupun batas daerah di dalam wilayah Sulawesi Barat.

Kemunculan klaim atas wilayah Sulawesi Barat harus terus diantisipasi dengan kesiapan sumber daya baik sumber daya manusia maupun kelengkapan data dan dokumen yang bisa menjadi kekuatan hukum dalam mengklaim wilayah khususnya wilayah terluar Sulawesi Barat.

5. Belum optimalnya fasilitasi kerjasama daerah (3).

Peran fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menjadi salah satu peran penting yang banyak mendukung dalam pelaksanaan pemerintahan di Sulawesi Barat. Namun peran fasilitasi ini seringkali tidak dapat berjalan dengan maksimal akibat kurangnya perhatian instansi terkait atas kebutuhan data serta kelengkapan laporan tindak lanjut atas kerjasama yang dilakukan.

Secara hukum daya ikat untuk meminta instansi yang telah difasilitasi kerjasamanya untuk melaporkan tindak lanjut kerjasama masih lemah. Meskipun telah terbit Permendagri 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Permendagri 25 tahun 2020 tentang Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga Luar Negeri, namun belum ada perda yang secara khusus mengikat di lingkup Pemerintah Sulawesi Barat.

Padahal laporan atas tindak lanjut fasilitasi kerjasama ini menjadi hal yang dinilai oleh pemerintah pusat atas kinerja pemerintah daerah. Untuk itu dukungan untuk mengoptimalkan fasilitasi kerjasama daerah ini perlu untuk dikuatkan.

6. Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan kegiatan keagamaan.

Fasilitasi terkait bidang keagamaan ini banyak yang menjadi isu penting sebab menjadi salah satu aspek yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kegiatan Hibah Rumah Ibadah yang selalu dilakukan setiap tahun menjadi salah satu hal yang banyak dimanfaatkan oleh umat beragama yang ada di wilayah Sulawesi Barat. Bantuan rumah ibadah ini membutuhkan sumber daya yang cukup untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas rumah ibadah yang akan dan telah menerima bantuan.

Salah satu kendala yang cukup terasa di lapangan adalah keterbatasan sumber daya serta lokasi rumah ibadah yang menerima bantuan tersebut. Sejumlah rumah ibadah yang terletak di pelosok masih memiliki akses media komunikasi dan transportasi yang terbatas. Hambatan eksternal ini berbenturan langsung dengan hambatan internal terkait terbatasnya sumber daya baik transportasi maupun komunikasi yang mendukung mobilitas tim evaluasi dan monitoring di lapangan.

Pelaksanaan MTQ dan STQ pun perlu menjadi perhatian penting karena berpengaruh langsung pada pandangan publik pada Pemerintah Sulawesi Barat. Keikutsertaan pada ajang MTQ dan STQ saja tidak akan bisa menaikkan citra positif masyarakat atas kemampuan Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan di bidang Keagamaan. Upaya untuk meraih posisi pemenang di kompetisi tersebut juga perlu menjadi perhatian yang berarti upaya koordinasi dan pembinaan di tingkat kabupaten dan provinsi perlu direncanakan dan dilakukan dengan baik.

7. Belum optimalnya koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. (4)



Pemahaman atas peran pemerintah provinsi khususnya Sekretariat Daerah dalam fasilitasi kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar masih rendah. Hal ini menghambat proses koordinasi dalam upaya fasilitasi yang dilakukan.

Hal ini tercermin dalam peran pemerintah Provinsi terkait dana BOS yang belum diatur secara jelas sehingga dalam panyaluran dana BOS bisa terjadi melibatkan komunikasi langsung antara KPPN dengan pihak sekolah di kabupaten/kota tanpa melibatkan Pemerintah Provinsi melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Hal ini menjadi sangat penting untuk dibuatkannya aturan hukum yang secara jelas menetapkan SOP dan peran masing-masing instansi/perangkat daerah dalam penyaluran dan pengawasan dana BOS ini.

Di sisi lain, peran Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat terkait non pelayanan dasar di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan masih belum sepenuhnya dipahami oleh instansi teknis serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pelibatan secara aktif oleh instansi teknis dalam upaya perumusan kebijakan di bidang tersebut perlu dilakukan.

b. Belum Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Belum optimalnya fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota.

Pembinaan produk hukum daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan provinsi oleh Menteri Dalam Negeri dan rancangan peraturan kabupaten oleh Gubernur, hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah provinsi dalam melakukan fasilitasi peraturan perundang-undangan sangat urgen. Disatu sisi produk hukum daerah yang disusun oleh pemerintah provinsi difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, namun disisi yang lain pemerintah provinsi juga melakukan fasilitasi terhadap produk hukum daerah yang disusun oleh pemerintah kabupaten.

3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum.





Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah, tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum yang ditujukan kepada kepala daerah, perangkat daerah, dan lembaga pemerintahan di bawahnya yang timbul dari pihak swasta, masyarakat maupun perorangan. Kepala daerah mempunyai tugas untuk mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan namun dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya perkara hukum yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, diperlukan penanganan dan penyelesaian secara komprehensif untuk penyelesaian sengketa di badan peradilan.

Dalam rangka penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta sebagai standarisasi metode penyelesaian permasalahan litigasi dan non litigasi, sementara itu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, bahwa dalam penanganan perkara pemerintah daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

- c. Belum Optimalnya Fasilitasi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya pembinaan pengelolaan BUMD dan BLUD

Tujuan utama pembentukan/pendirian BUMD dan BLUD merupakan salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah di sektor bisnis. Namun kendala yang dihadapi sampai saat ini BUMD dan BLUD belum mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan APBD di Sulawesi Barat. Hal ini disebabkan karena:

Khusus untuk BUMD Perumda Sebuku Energi Malaqbi terkendala dengan belum diserahkannya dana PI (Participating Interest) oleh kontraktor pengelola migas pada blok Sebuku;

Khusus untuk BUMD Perseroda Sulawesi Barat Malaqbi, pengelolaan perseroda tersebut belum dapat memberikan hasil yang maksimal dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap Direksi pengelola Perusda;

Khusus untuk BLUD penerimaan pendapatan yang diterima pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat belum sesuai dengan yang dituangkan dalam rencana bisnis anggaran BLUD. Hal ini dikarenakan jumlah pasien yang diproyeksikan tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi.

2. Belum optimalnya Pengendalian dan perumusan kebijakan perekonomian daerah terkait inflasi daerah.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (administered prices).

Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap shocks tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat. Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) mulai tahun 2008.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam mengkoordinasikan sekaligus mengarahkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Selain itu, Pokjanas (kelompok kerja nasional) TPID dibangun sebagai sarana untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah yang memerlukan kebijakan pemerintah pusat. Berbagai rekomendasi pengendalian harga yang dihasilkan TPID dinilai sedikit banyak telah membantu pemangku kepentingan di daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian harga.

Keanggotaan TPID terdiri atas berbagai instansi pemerintahan daerah, Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya sejauh ini mampu membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga. Koordinasi yang solid di antara berbagai penentu kebijakan publik di daerah tersebut menghasilkan kombinasi kebijakan yang terintegrasi, sehingga secara keseluruhan berdampak positif bagi terjaganya harga barang pokok bagi masyarakat. Diharapkan, TPID ke depan tidak hanya menysasar persoalan yang

memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek, namun secara bertahap direncanakan mulai menyentuh pada solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural seperti peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan struktur pasar yang efisien.

3. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaku usaha dan instansi terkait kebijakan akses keuangan daerah.

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari sejauh mana kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin untuk menetapkan dan mengambil keputusan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal kebijakan ekonomi, implementasinya diwujudkan dalam pembuatan regulasi dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Memasuki era baru sistem pemerintah di Indonesia terutama sejak dilaksanakannya otonomi daerah, pembuatan kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan daerah sudah lebih leluasa dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerah, khususnya dalam bidang ekonomi demi memperkuat ekonomi lokal yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan terutama bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam mengembangkan potensi usaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Keterlibatan masyarakat dalam proses meningkatkan kesejahteraan, diharapkan dapat memiliki rasa tanggung jawab dan mendorong terwujudnya kesejahteraan bersama sehingga kemiskinan dapat ditekan.

Dalam menciptakan sinergitas antara pelaku usaha dan instansi terkait diharapkan pemerintah dapat memberikan layanan prima bagi setiap masyarakat khususnya pelaku usaha dalam hal pembuatan perijinan usaha yang dapat diperoleh dengan cepat, murah, dan ramah serta untuk mengakses lembaga-lembaga permodalan dapat kiranya difasilitasi oleh pemerintah sehingga sektor riil akan dapat bergerak lebih nyata karena pelaku usaha memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan produktifitas dan akses informasi dapat kiranya dibangun dengan penyebaran yang merata agar supaya pelaku usaha mendapatkan informasi dengan mudah dan akurat.

4. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah. (1)

Dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran, Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) membutuhkan suatu sistem yang



dapat terintegrasi langsung kepada setiap SKPD dan Kabupaten yang ada sehingga proses pengawasan realisasi penyerapan anggaran dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk melihat perkembangan dalam penyerapan anggaran dalam pengambilan kebijakan.

TEPRA diharapkan dapat menjadi alat guna mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan APBN/APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, TEPRA juga diharapkan dapat meminimalisir masalah dan hambatan yang menghambat penyerapan anggaran, sehingga diharapkan dengan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional, roda perekonomian dapat bergerak dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

d. Belum Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah pusat maupun daerah terus menyiapkan regulasi yang dianggap dapat mendukung percepatan proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Bukan hanya itu, pengembangan system SPSE juga terus diselaraskan.

Kendati demikian, nampaknya percepatan proses pengadaan barang dan jasa belum maksimal dicapai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Lambatnya proses perencanaan, ketidak cakapan pelaku pengadaan dan faktor-faktor lain menjadi penyebab keterlambatan. Akibatnya sering ditemui masalah dalam hal realisasi dan pembayaran pekerjaan.

Hal ini menjadi sangat penting untuk mendapat perhatian serius. Kolaborasi kerja antara Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan semua stake holders harus semakin ditingkatkan. Demikian pula dengan kegiatan monitoring pimpinan yang efektif sangat dibutuhkan.

2. Belum optimalnya kapasitas SDM pengadaan barang dan jasa.

Pelaku pengadaan barang dan jasa sangat menentukan efektifitas proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Mulai dari proses perencanaan sampai dengan selesainya pekerjaan. Oleh sebab itu pengembangan kapasitas SDM perlu mendapat perhatian yang serius.

Saat ini Biro Pengadaan Barang dan jasa memiliki 11 orang dari kebutuhan 20 orang pada formasi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa (kurang dari target 60%). Selain itu juga belum memiliki personil perencana, pengelola kontrak dan pengelola swakelola. Belum lagi kebutuhan personil dalam bidang kelembagaan dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Selain itu, kebutuhan SDM eksternal Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga perlu mendapat perhatian. Termasuk di dalamnya ketersediaan SDM pelaku pengadaan pada setiap Perangkat Daerah dan pembinaan penyedia sebagai mitra. Semua ini perlu dikolaborasikan agar efektifitas proses pengadaan barang jasa bisa dilaksanakan.

3. Belum optimalnya fungsi advokasi dan kematangan kelembagaan barang dan jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak hanya berfokus pada proses pemilihan penyedia barang jasa saja. Pada sisi lain, aspek lain seperti kelembagaan dan advokasi juga menjadi prioritas utama. Inilah ruh dari transformasi Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Pada sisi kelembagaan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dituntut untuk menjadi Lembaga dengan manajemen yang baik. Hal ini dilakukan dengan pemenuhan standarisasi dan pola kerja yang standar. Demikian pula dalam menjalankan fungsi kordinator UKPBJ kabupaten/kota di Sulawesi Barat.

Pada Aspek Advokasi, keberadaan UKPBJ dituntut untuk selalu memberi pendampingan. Penyelenggaraan kegiatan konsultasi yang berkesinambungan menjadi sangat penting. Demikian pula kegiatan upgrading pengetahuan melalui diklat, sertifikasi dan sosialisasi.

4. Belum optimalnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara eletronik.

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara elektronik. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pengadaan yang sudah ada. Pengelolaan perangkat yang baik akan sangat menentukan kelancaran proses pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, LPSE memegang peranan yang sangat penting.

Pertama, pemenuhan SDM pengelolaan LPSE. Dibutuhkan ketersediaan SDM yang professional untuk mengelola bagian-bagian seperti admin, pemeliharaan perangkat. Bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas.

Kedua, pemenuhan sarana-prasarana. LPSE dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pendampingan memerlukan adanya sarana yang memadai. Mulai dari backup keamanan sampai pada fasilitas administrasi.

Ketiga, adalah pengelolaan informasi yang efektif. Hal ini dapat diwujudkan bila ada kordinasi yang baik dengan pihak lain, terutama yang membidani keuangan dan perencanaan. Selain itu keberadaan aplikasi lokal penunjang yang baik akan sangat mendukung kinerja LPSE.

- e. Belum Optimalnya Penataan Kelembagaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi. (2)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

2. Belum Optimalnya Fasilitas dan Koordinasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. (3)

Isu akuntabilitas menekankan pentingnya membangun sistem akuntabilitas aparatur, baik menyangkut perencanaan program/kegiatan, penganggaran, penetapan kinerja, pengorganisasian, penatausahaan, monitoring, pengendalian maupun pelaporannya.

3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi peningkatan pelayanan publik. (4)

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/ prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

4. Belum optimalnya penataan dan fasilitasi kelembagaan pemerintah daerah. (1)

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*) yang "ramping struktur, kaya fungsi". Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

f. Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan administrasi pimpinan serta fasilitasi perangkat daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan



Pelayanan pimpinan dan perangkat daerah antara lain untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan pelayanan kerumahtanggaan di lingkup perkantoran maupun rumah jabatan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi biro umum yakni kurangnya pengendalian dan keterlambatan penyediaan logistik pada rumah tangga pimpinan dan kurangnya pengendalian, pengawasan serta pemeliharaan kendaraan dan bangunan. Hal tersebut menjadi faktor lemahnya Pelayanan Kerumahtanggaan dan pelayanan umum. Padahal Salah Satu Sentral Pelayanan Pimpinan Berada Pada Biro Umum Oleh Karenanya Hal tersebut Harus Mendapatkan Penguatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Pemahaman terkait pelaksanaan tugas pramusaji dan supir pimpinan / operasional juga masih perlu di tingkatkan mengingat hal tersebut merupakan kegiatan yang melekat dan merupakan pelayanan langsung.

2. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan lingkup Sekretariat.

Sistem manajemen keuangan daerah (*Financial Management System*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *Good Governance* di daerah. Bagian bagian lain yang sama pentingnya adalah ménata sistem perencanaan dan penganggaran, sistem penatausahaan, sistem akuntansi dan pelaporan. Tuntutan pembaharuan dan akuntabilitas sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan dengan mendasarkan konsep *value for money*, sehingga tercipta akuntabilitas public (*Public accountability*).

3. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah lingkup sekretariat.

Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian

Pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah milik daerah yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah. Dengan pengelolaan barang milik daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan prinsip *good governance* diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan barang milik daerah.

Sistem pengelolaan barang milik daerah tidak hanya mencakup pengelolaan barang milik daerah tetapi juga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimulai dari proses perencanaan pengadaan sebagai pemenuhan



sarana dan prasarana perkantoran sampai pada proses penghapusan yang dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan.

Barang milik daerah sekretariat daerah yang penatausahaannya berada pada Biro Umum mempunyai beberapa tantangan kedepannya diantaranya tingkat kebutuhan sarana dan prasarana yang cukup tinggi sedangkan kebutuhan anggaran yang kurang memadai, barang milik daerah yang masih dikuasai pihak lain atau sudah tidak diketahui keberadaannya, pencatatan dan kodefikasi barang milik daerah belum optimal serta barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah selain itu juga penggunaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang tidak optimal.

Dalam pencatatan dan kodefikas barang milik daerah juga msih perlu di optimalkan mengingat keadaan pasca bencana alam gempa bumi yang mengakibatkan beberapa barang milik daerah harus dilakukan penghapusan dan pencatatan ulang.

#### 4. Belum optimalnya pelayanan pimpinan.

Pelayanan pengelolaan administrasi pimpinan merupakan ujung tombak pelayanan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pimpinan atau pejabat pemerintah harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika pengelolaan administrasi tidak dilakukan dengan baik pula.

Salah satu aspek yang sangat mendukung kinerja urusan pemerintahan yaitu dengan adanya pengelolaan administrasi pimpinan yang meliputi pelayanan persuratan, pengarsipan dokumen, penyiapan materi dan komunikasi pimpinan serta pelayanan keprotokolan.

Pengelolaan administrasi pimpinan merupakan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan tindakan pimpinan sebagai pejabat pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dilihat dari tata kelola administrasi yang baik serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen yang baik dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pengelolaan administrasi pemerintahan terlebih pada pelayanan pengelolaan administrasi pimpinan.

Pengelolaan administrasi pada pemerintahan daerah yang mutakhir menuju percepatan pembangunan yang maju dan bersaing sudah selayaknya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi infomasi berbasis digital dan sistem daring. Dengan demikian, pelayanan pimpinan yang membutuhkan fasilitasi tata kelola administrasi baik pada aspek administrasi persuratan dan pengarsipan,

penyiapan materi pimpinan, fasilitasi komunikasi, pelaksanaan acara dan keprotokoleran dapat dilakukan dengan cepat dengan sistem yang terintegrasi

Biro Umum Sekretariat Daerah menjalankan fungsi utama yaitu pelayanan pimpinan dan perangkat daerah antara lain untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan pelayanan kerumahtanggan di lingkup perkantoran maupun rumah jabatan.

5. Belum optimalnya penyiapan materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan  
Fasilitasi materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan merupakan hal yang sangat perlu mendapat perhatian mengingat tertib dan lancarnya kegaitan pimpinan ditentukan pengaturan acara dan penyiapan materi serta komunikasi antar penyelenggara kegiatan.

Perlunya peningkatan keterampilan dasar sangat diperlukan dikarenakan sumberdaya yang ada masih kurang memahami terkait keprotokoleran. Pelatihan terkait penyiapan materi pimpinan juga perlu dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas materi pimpinan serta kemampuan komunikasi dalam pelaksanaan tugas pendampingan pimpinan masih kurang efektif. Selain itu belum adanya ASN yang berertififikasi dan memenuhi standar menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan

#### **2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**

Rancangan Awal RKPD merupakan susunan awal dari program kerja dan kegiatan yang menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan yang telah direview dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan pada tahapan RKPD.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indicator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Provinsi Sulawesi Barat**

**Nama Perangkat Daerah : Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	75,50	712.161.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	75,50	204.542.000	
			Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100,00	692.454.000			Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100,00	66.940.000	
			Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	70,00	1.136.850.000			Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	70,00	372.658.000	
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	98,99	1.038.270.000			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	98,99	196.560.000	



1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	23,00	313.100.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	23,00	94.799.000	
			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17,00	250.000.000			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17,00	65.700.000	
			Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10,00	60.000.000			Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10,00	33.650.000	
			Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6,00	55.000.000			Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6,00	3.420.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	250.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	65.700.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	22.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	9.987.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	27.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	11.250.000		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	3.430.000		



	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	4.432.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	33.650.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	55.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	3.420.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	34.061.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	6.973.000	
			Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	34.061.000			Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	6.973.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju	Penyusunan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	5.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju	Penyusunan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	-	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju	Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	5.321.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju	Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	-	



	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mamuju	Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	3.540.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mamuju	Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2.540.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Mamuju	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	3.300.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Mamuju	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4.433.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mamuju	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	3.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mamuju	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	-	
<b>II I</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>	<b>19.410.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	3.540.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	-	



	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	9.870.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	-	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	3.500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	2.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	-	
<b>II</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>	<b>692.454.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>	<b>66.940.000</b>	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mamuju	Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5	7.554.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mamuju	Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	168.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	75.640.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	35.340.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	15.700.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju	Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	7.760.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju	Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	-	



	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8	121.310.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	196.490.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	31.600.000
<b>I V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>	<b>1.136.850.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>	<b>372.658.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	15.670.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	138.900.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	85.400.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	75.400.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	26.100.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25	9.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	-





	Perundang-Undangan					Perundang-Undangan					
	Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	112.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	55.870.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	612.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	200.638.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	3.210.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	-	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	19.870.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	4.650.000	
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>	<b>558.030.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>	<b>55.430.000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	250.800.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	65.400.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	
	Pengadaan Mebel	Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	45.000.000	Pengadaan Mebel	Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	



	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	77.540.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	55.430.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	54.900.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	64.390.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	
<b>V I</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>	<b>5.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	-	
<b>V II</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>	<b>475.240.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>	<b>141.130.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	97.700.000	



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	76.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	-
	Pemeliharaan Mebel	Mamuju	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	25.000.000	Pemeliharaan Mebel	Mamuju	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	63.420.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	25.890.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	55.320.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	55.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	17.540.000
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>		<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>100</b>	<b>3.251.754.000</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>		<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>100</b>	<b>1.500.000.000</b>
<b>I</b>	<b>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>		<b>Tersedianya Dokumen Tugas Pemerintahan</b>	<b>8</b>	<b>1.291.438.000</b>	<b>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>		<b>Tersedianya Dokumen Tugas Pemerintahan</b>	<b>8</b>	<b>584.650.000</b>
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	3	623.460.000	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Polewali Mandar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1	165.230.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2	378.540.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Majene	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1	209.650.000



	Fasilitas Penataan Wilayah	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	4	289.438.000	Fasilitas Penataan Wilayah	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	1	209.770.000	
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>		<b>Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah</b>	<b>7</b>	<b>1.380.016.000</b>	<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>		<b>Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah</b>	<b>7</b>	<b>750.000.000</b>	
	Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2	726.500.000	Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2	269.870.000	
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	2	184.666.000	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	2	101.210.000	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3	468.850.000	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Majene	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2	378.920.000	
<b>II I</b>	<b>Fasilitas Kerja Sama Daerah</b>		<b>Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah</b>	<b>3</b>	<b>580.300.000</b>	<b>Fasilitas Kerja Sama Daerah</b>		<b>Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah</b>	<b>3</b>	<b>165.350.000</b>	
	Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	Mamuju	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1	212.340.000	Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	Mamuju	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1	165.350.000	
	Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Mamuju	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1	189.320.000	Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Mamuju	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	0	-	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Mamuju	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1	178.640.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Mamuju	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	0	-	
<b>C</b>	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>	<b>15.748.841.000</b>	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>	<b>17.899.000.000</b>	
<b>I</b>	<b>Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual</b>		<b>Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama</b>	<b>100</b>	<b>14.087.120.000</b>	<b>Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual</b>		<b>Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama</b>	<b>100</b>	<b>15.873.100.000</b>	



	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Se Prov. Sulbar	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	300	10.518.920.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Se Prov. Sulbar	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	750	10.716.860.000	
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Se Prov. Sulbar	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	6	3.568.200.000	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Mamuju	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	6	5.156.240.000	
<b>II</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>		<b>Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar</b>	<b>3</b>	<b>780.411.000</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>		<b>Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar</b>	<b>1</b>	<b>25.000.000</b>	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	345.670.000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	25.000.000	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1	234.530.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	0	-	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	200.211.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	0	-	
<b>II I</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>		<b>Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>	<b>100</b>	<b>881.310.000</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>		<b>Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>	<b>100</b>	<b>2.000.900.000</b>	



	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	350.900.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	2.000.900.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1	300.210.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1	230.200.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	0	-	

**Nama Perangkat Daerah : Biro Hukum**

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan
----	---------------------	--------------------------	---------



											Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mamuju	Nilai SAKIP Lingkup Biro Hukum	80	158.700.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mamuju	Nilai SAKIP Lingkup Biro Hukum	80	140.120.872,00	
		Mamuju	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Hukum	100	613.600.000,00		Mamuju	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Hukum	100	172.200.812,00	
		Mamuju	Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Hukum	90	1.790.800.000,00		Mamuju	Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Hukum	90	675.499.026,00	
		Mamuju	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Hukum	98,85	50.800.000,00		Mamuju	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Hukum	98,85	44.760.600,00	
		Mamuju	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Hukum	25	47.000.000,00		Mamuju	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Hukum	25	33.753.880,00	
		Mamuju	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Hukum	19	35.200.000,00		Mamuju	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Hukum	19	19.099.192,00	
		Mamuju	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Hukum	9	71.500.000,00		Mamuju	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Hukum	9	84.742.040,00	
		Mamuju	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Hukum	4,50	5.000.000,00		Mamuju	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Hukum	4,50	2.525.760,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	47.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	33.753.880,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	23.200.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	11.599.640,00	





		Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	4.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2.500.000,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	4.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2.499.888,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	4.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2.499.664,00	
		Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	71.500.000,00		Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	84.742.040,00	
		Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	5.000.000,00		Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2.525.760,00	
		Mamuju	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Biro Hukum	98,85	15.000.000,00		Mamuju	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Biro Hukum	98,85	7.929.752,00	
		Mamuju	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Hukum	100	35.800.000,00		Mamuju	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Hukum	100	36.830.848,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	5.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	2.247.720,00	





		Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	5.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	3.494.312,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	5.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	2.187.720,00	
		Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	20.800.000,00		Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	32.601.340,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	5.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1.987.720,00	
		Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	5.000.000,00		Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	2.241.788,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	5.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	-	
		Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	44.200.000,00		Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	2.176.192,00	
		Mamuju	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	-	



		Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	-	
		Mamuju	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	-	
		Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	14.200.000,00		Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	2.176.192,00	
		Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	349.400.000,00		Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	30.590.812,00	
		Mamuju	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	25.000.000,00		Mamuju	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	-	
		Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	74	75.000.000,00		Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	74	-	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	33.400.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	30.590.812,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	-	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	5.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	-	



		Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	51.000.000,00		Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	-	
		Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	75.000.000,00		Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	-	
		Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	75.000.000,00		Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	-	
		Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	1.226.600.000,00		Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	564.662.046,00	
		Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	-	
		Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	20.000.000,00		Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	-	
		Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	200.000.000,00		Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	156.000.000,00	
		Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	50.000.000,00		Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	9.138.000,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	50.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	-	



		Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	180.000.000,00		Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	84.350.000,00	
		Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	500.000.000,00		Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	274.245.966,00	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	50.000.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	-	
		Mamuju	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	166.600.000,00		Mamuju	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	40.928.080,00	
		Mamuju	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Hukum	100	415.000.000,00		Mamuju	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100.893.548,00	
		Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	60.000.000,00		Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	-	
		Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	40.000.000,00		Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	-	
		Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	10.000.000,00		Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	-	
		Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	200.000.000,00		Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	100.893.548,00	
		Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	30.000.000,00		Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	-	



		Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	75.000.000,00		Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	-	
		Mamuju	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	105.000.000,00		Mamuju	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	7.767.240,00	
		Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	105.000.000,00		Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	7.767.240,00	
		Mamuju	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	264.200.000,00		Mamuju	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	141.610.000,00	
		Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	89.200.000,00		Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	98.280.000,00	
		Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	60.000.000,00		Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	26.720.000,00	
		Mamuju	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	25.000.000,00		Mamuju	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	-	
		Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	50.000.000,00		Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	9.900.000,00	



		Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	20.000.000,00		Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	-
		Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	20.000.000,00		Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	6.710.000,00
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100	1.085.000.000,00	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100	1.031.320.441,00
		Mamuju	Persentase Pengelolaan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	100	690.000.000,00		Mamuju	Persentase Pengelolaan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	100	774.367.711,00
		Mamuju	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	40	200.000.000,00		Mamuju	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	40	391.718.062,00
		Mamuju	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	520	120.000.000,00		Mamuju	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	520	90.980.234,00
		Mamuju	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	600	120.000.000,00		Mamuju	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	600	84.675.565,00
		Mamuju	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	141	250.000.000,00		Mamuju	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	141	206.993.850,00
		Mamuju	Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	100	395.000.000,00		Mamuju	Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	100	256.952.730,00
		Mamuju	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3	250.000.000,00		Mamuju	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3	162.062.453,00



		Mamuju	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	2	145.000.000,00		Mamuju	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	2	94.890.277,00	
--	--	--------	---	---	----------------	--	--------	---	---	---------------	--

**Nama Perangkat Daerah : Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mamuju	Nilai SAKIP Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	65	Rp 2.810.215.901,34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mamuju	Nilai SAKIP Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	64,5	Rp 837.932.442,00	
		Mamuju	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100			Mamuju	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	75		
		Mamuju	Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	75			Mamuju	Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	65		
		Mamuju	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	95			Mamuju	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	75		



1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	22	132.108.620,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	22	139.547.164,00
		Mamuju	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	22			Mamuju	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	22	
		Mamuju	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	9,80			Mamuju	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	9,80	
		Mamuju	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	9,80			Mamuju	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	7,10	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	18.872.660,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	48.437.164,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	18.872.660,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	18.872.660,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	18.872.660,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	-





5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	18.872.660,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	-	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2	18.872.660,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2	91.110.000,00	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	18.872.660,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	95	52.843.448,35	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	95	69.900.000,00	
		Mamuju	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100			Mamuju	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100		
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	6.290.886,67	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	-	



9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	6.290.886,67	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	-	
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	6.290.886,67	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	-	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	6.290.886,67	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	-	
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	6.290.886,67	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	-	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3	21.389.015,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3	69.900.000,00	
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mamuju	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	6.290.886,67	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mamuju	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	95.110.671,76	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	3.000.000,00	



15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	28.777.667,94	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	-	
16	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	28.777.667,94	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	-	
17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	18.777.667,94	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	-	
18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	18.777.667,94	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	3.000.000,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	281.021.590,16	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	63.595.000,00	
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mamuju	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	35.127.698,77	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mamuju	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	-	
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50	35.127.698,77	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50	43.695.000,00	
21	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	35.127.698,77	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	-	
22	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	35.127.698,77	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	-	



2 3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	35.127.698,77	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	-	
2 4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	35.127.698,77	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	19.900.000,00	
2 5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3	35.127.698,77	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	
2 6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	35.127.698,77	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	1.804.637.831,41	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	417.748.778,00	
2 7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	-	
2 8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	290.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	121.685.436,00	
2 9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	-	
3 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	162.513.299,49	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	37.000.000,00	



3 1	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Mamuju	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	2	162.513.299,4 9	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Mamuju	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	2	10.045.872,00	
3 2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	162.513.299,4 9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	-	
3 3	Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	162.513.299,4 9	Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	21.024.950,00	
3 4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	529.558.034,4 7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	195.422.520,00	
3 5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	162.513.299,4 9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0		
3 6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	162.513.299,4 9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	32.570.000,00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	25.814.124,27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	6.641.500,00	
3 7	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	6.941.464,27	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-	
3 8	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	3.774.532,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	



39	Pengadaan Mebel	Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	3.774.532,00	Pengadaan Mebel	Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	6.641.500,00
40	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	3.774.532,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-
41	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	3.774.532,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-
42	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	3.774.532,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	162.513.299,49	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	3.000.000,00
43	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	162.513.299,49	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3.000.000,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	256.166.315,90	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	134.500.000,00



4 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	124.000.000,00
4 5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	83.166.932,28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	-
4 6	Pemeliharaan Mebel	Mamuju	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	21.499.691,81	Pemeliharaan Mebel	Mamuju	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	-
4 7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	21.499.691,81	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2	10.500.000,00
4 8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	15.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-
4 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	15.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	90	471.971.009,01	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100	932.438.650,00
9	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	90	131.971.009,01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	90	487.438.750,00





50	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	12	71.971.009,01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	5	342.438.850,00
51	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	6	60.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	5	144.999.900,00
10	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebijakan SDA	100	140.000.000,00	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebijakan SDA	100	74.999.900,00
52	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	10	50.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	0	-
53	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	10	50.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	0	-
54	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12	40.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	4	74.999.900,00
11	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebijakan BUMD dan BLUD	100	200.000.000,00	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebijakan BUMD dan BLUD	100	370.000.000,00
55	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	8	40.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4	106.037.100,00





5 6	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah	12	40.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah	4	103.962.900,00	
5 7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	12	40.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0	-	
5 8	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	10	40.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	4	160.000.000,00	
5 9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	12	40.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	0	-	
3	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100	550.632.842,84	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100	339.230.000,00	
1 2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100	350.632.842,84	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100	231.230.000,00	
6 0	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12	150.632.842,84	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	0	-	



61	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12	100.000.000,00	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	5	121.230.000,00
62	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	13	100.000.000,00	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	5	110.000.000,00
13	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	100	200.000.000,00	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Persentase Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	100	108.000.000,00
63	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	13	70.000.000,00	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	0	-
64	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	13	60.000.000,00	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	5	108.000.000,00
65	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Teknis Pembangunan Daerah	12	70.000.000,00	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Teknis Pembangunan Daerah	0	-

**Nama Perangkat Daerah : Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mamuju	Nilai SAKIP Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	60	2.810.215.901,29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mamuju	Nilai SAKIP Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	60	836.560.000,00	
		Mamuju	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100			Mamuju	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100		
		Mamuju	Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	70			Mamuju	Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	70		
		Mamuju	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	96,37			Mamuju	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	96,37		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	22,50	440.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	22,50	160.000.000,00	
		Mamuju	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	22,50			Mamuju	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	22,50		
		Mamuju	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	9,50			Mamuju	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	9,50		
		Mamuju	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7			Mamuju	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	80.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	34.800.000,00	



2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	60.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	10.000.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	60.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	10.000.000,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	60.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10.000.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	60.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	10.000.000,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	60.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	26.000.000,00	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	60.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	59.200.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	97,00	135.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	10.000.000,00	
		Mamuju	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100			Mamuju	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100		



8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	55.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5.000.000,00	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	80.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	5.000.000,00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	380.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	50.000.000,00	
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80	100.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	280.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	50.000.000,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	750.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	411.000.000,00	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	200.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	94.000.000,00	
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	10	50.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	10	17.000.000,00	



			Penggandaan yang Disediakan					Penggandaan yang Disediakan			
14	Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40	200.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40	100.000.000,00	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	300.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	200.000.000,00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	550.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	70.000.000,00	
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	100.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	
17	Pengadaan Mebel	Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	200.000.000,00	Pengadaan Mebel	Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	250.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	70.000.000,00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	55.215.901,29	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	12.200.000,00	
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	55.215.901,29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	12.200.000,00	



7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	500.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	123.360.000,00	
20	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	250.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	75.650.000,00	
21	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	250.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	47.710.000,00	
2	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Mamuju	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	75,95	332.913.069,68	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Mamuju	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	75,95	1.741.971.364,00	
8	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur	100	110.971.023,68	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur	100	554.160.000,00	
22	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2	36.990.341,68	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2	111.000.000,00	
23	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	36.990.341,00	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	202.760.000,00	
24	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	36.990.341,00	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	240.400.000,00	





9	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Mamuju	Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	110.971.023,00	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Mamuju	Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	625.011.364,00
25	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Mamuju	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4	36.990.341,00	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Mamuju	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4	157.211.364,00
26	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	36.990.341,00	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	367.600.000,00
27	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	36.990.341,00	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	100.200.000,00
10	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	100	110.971.023,00	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	100	562.800.000,00
28	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30	36.990.341,00	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30	177.800.000,00
29	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	36.990.341,00	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	122.800.000,00
30	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3	36.990.341,00	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3	262.200.000,00





**Nama Perangkat Daerah : Biro Organisasi**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Lingkup Biro Organisasi	89	1.749.687.479,63	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Lingkup Biro Organisasi	89	1.074.932.421	
			Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Organisasi	100				Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Organisasi	100		
			Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Organisasi	75				Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Organisasi	75		
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Organisasi	97				Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Organisasi	97		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	28	31.614.939,60	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	28	379.716.260	
			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Organisasi	24				Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Organisasi	24		
			Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	14.70				Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	14.70		



			Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Organisasi	18				Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Organisasi	18		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10.538.321,60	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	136.056.060,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	10.538.309,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	165.548.600,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	4	10.538.309,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	4	78.111.600,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Organisasi	100 %	105.383.100,13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Organisasi	100%	56.370.000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	35.127.704,13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	10.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	53	35.127.698,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	53	31.370.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	35.127.698,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	15.000.000	



Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Organisasi	100 %	1.417.151.130,90	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Organisasi	100%	437.727.381	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	100.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	4.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	100.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	300	200.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	300	40.069.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	80	150.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	80	26.700.000	
Penyediaan Bahan/Material	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	60	200.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	60	77.607.901	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Wilayah Sulawesi Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	70	467.151.130,90	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Wilayah Sulawesi Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	70	220.805.862	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	10	100.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	10	4.244.618	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	100.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	54.300.000	



	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	100 %	10.538.309,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	100%	25.278.750	
	Pengadaan Mebel	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	15	10.538.309,00	Pengadaan Mebel	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	15	25.278.750	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	100 %	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	100%	66.124.630	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	66.124.630	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Lingkup Biro Organisasi	100 %	85.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Lingkup Biro Organisasi	100%	109.715.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	13	60.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	13	88.050.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	25.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	21.665.400	



2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Minimal B+	33,00%	1.465.505.660,80	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Minimal B+	33,00%	1.134.589.701
			Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 10 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP	100%				Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 10 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP	100%	
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada	80%	504.564.622,80	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada	80%	484.805.441
			Indeks Kematangan Organisasi	28.1-37				Indeks Kematangan Organisasi	28.1-37	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi (Dokumen)	1	173.188.207,60	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi (Dokumen)	1	196.626.950,00
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, SULAWESI BARAT	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	178.188.207,60	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, SULAWESI BARAT	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	110.455.391,00
	Penataan Analisis Jabatan	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	3	153.188.207,60	Penataan Analisis Jabatan	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	3	177.723.100,00
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada	50%	960.941.038,00	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada	50%	649.784.260



			Nilai SAKIP Pemprov.	70 Poin				Nilai SAKIP Pemprov.	70 Poin		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, SULAWESI BARAT	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	8	218.188.207,60	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, SULAWESI BARAT	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	8	143.519.260,00	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, SULAWESI BARAT	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen )	7	213.188.207,60	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, SULAWESI BARAT	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen )	7	126.265.000,00	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	1	143.188.207,60	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	1	80.000.000,00	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan(Dokumen )	30	163.188.207,60	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Mamuju, Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan(Dokumen )	30	134.966.414,00	



	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, SULAWESI BARAT	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	3	223.188.207,60	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, SULAWESI BARAT	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	3	165.033.586,00	
--	---	--	--	---	----------------	---	--	--	---	----------------	--

**Nama Perangkat Daerah : Biro Umum**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Nilai SAKIP Lingkup Biro Umum	82	89.830.962,98	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Nilai SAKIP Lingkup Biro Umum	82	749.991.450,00	
		Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Umum	100	2.637.387.623,35		Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Umum	100	16.094.905.147,00	
		Mamuju, Simboro dan	Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Umum	4	10.765.860.920,10		Mamuju, Simboro dan	Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Umum	4	33.690.307.429,00	



		Kepulauan, Rangas					Kepulauan, Rangas				
		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Umum	100	28.660.159.012,88		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Umum	100	29.901.034.123,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Umum	25	23.280.962,98	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Umum	25	260.000.000,00	
		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Umum	21	33.150.000,00		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Umum	21	128.473.900,00	
		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Umum	12,5	13.100.000,00		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Umum	12,5	80.522.000,00	
		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Umum	15	20.300.000,00		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Umum	15	280.995.550,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	23.280.962,98	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	260.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen RKA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-Biro Umum	1	9.350.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen RKA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-Biro Umum	1	43.659.650,00	





	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum	1	12.300.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum	1	47.755.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-Biro Umum	1	4.200.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-Biro Umum	1	16.507.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum	1	7.300.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum	1	20.551.350,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro Umum	2	13.100.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro Umum	2	80.522.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	20.300.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	280.995.550,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Umum	100	28.416.559.012,88	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Umum	100	29.580.470.423,00	



		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup Biro Umum	100	91.600.000,00		Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup Biro Umum	100	210.953.350,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3420	28.102.159.012,88	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3420	27.751.254.429,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	106.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	198.522.150,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Biro Umum	2450	167.100.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Biro Umum	2450	1.275.738.440,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Biro Umum	1	41.300.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Biro Umum	1	354.955.404,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro Umum	2	15.200.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro Umum	2	54.964.170,00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	51.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	118.897.400,00	



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Umum dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Umum	16	25.400.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Umum dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Umum	16	37.091.780,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Umum	100	524.105.265,59	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Umum	100	4.432.886.903,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Biro Umum	30	91.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Biro Umum	30	387.074.027,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Biro Umum	4	204.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Biro Umum	4	2.188.213.550,00	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Biro Umum	4	30.500.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Biro Umum	4	288.850.810,00	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Biro Umum	6	51.705.265,59	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Biro Umum	6	454.446.990,00	



	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	72	30.400.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	72	120.098.061,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	2	76.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	2	702.978.085,00	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Umum	11	40.500.000,00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Umum	11	291.225.380,00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	152.000.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	109.610.350,00	
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2	152.000.000,00	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2	109.610.350,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Umum	100	1.405.107.950,64	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Umum	100	1.368.794.689,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	7	239.107.950,64	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	7	72.767.800,00	



	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	207.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	138.853.650,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	154.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	194.677.050,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7	167.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7	146.716.189,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	143.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	190.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	495.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	625.780.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Umum	100	6.659.790.153,67	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Umum	100	10.568.885.843,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	940.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	1.088.451.518,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	278.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	617.044.698,00	



	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2.844.790.153,67	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	4.599.090.921,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	290.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	245.714.650,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	1.010.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	3.027.734.856,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1.170.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	900.149.200,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	127.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	90.700.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	406.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	14.949.000.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	203.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	35.503.000,00	
	Pengadaan Mebel	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	40.300.000,00	Pengadaan Mebel	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	11.500.000.000,00	





	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	102.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	2.913.497.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70	60.700.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70	500.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.175.965.500,84	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.739.534.683,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	310.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	439.686.948,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1.720.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.253.554.551,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1.145.965.500,84	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1.046.293.184,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.232.279.672,71	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	14.726.110.458,00	



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20	204.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20	3.250.024.251,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120	406.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120	3.663.942.433,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170	102.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170	2.446.537.700,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	520.279.672,71	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	5.365.606.074,00
<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum	100	52.980.267.343,94	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum	100	28.524.396.197,00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	1.500.000.000,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	1.286.756.487,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	270.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	239.619.917,00





	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	80.000.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	47.136.570,00	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	1.150.000.000,00	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	1.000.000.000,00	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	26.980.267.343,94	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	12.331.212.154,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5	8.700.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5	3.832.575.767,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5	6.180.267.343,94	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5	2.299.545.460,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	10	12.100.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	10	6.199.090.927,00	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	18.000.000.000,00	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	10.191.169.869,00	



	Penyiapan Materi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	210	2.400.000.000,00	Penyiapan Materi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	210	183.007.000,00	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	950	12.000.000.000,00	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	950	9.332.542.769,00	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1500	3.600.000.000,00	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1500	675.620.100,00	
	Fasilitasi Keprotokolan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan	100	6.500.000.000,00	Fasilitasi Keprotokolan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan	100	4.715.257.687,00	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1100	1.800.000.000,00	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1100	931.614.350,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	1.850.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	2.682.803.037,00	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1000	2.850.000.000,00	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1000	1.100.840.300,00	



## 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun Anggaran 2024 tidak memiliki catatan usulan untuk Sekretariat Daerah pada umumnya dan Biro-biro pada khususnya baik itu dari Masyarakat maupun dari para pemangku kepentingan ataupun para stakeholder. Dengan demikian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2024 tidak memuat Program ataupun Kegiatan yang berasal dari usulan-usulan tersebut.



**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah**

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran yang akan dicapai tentunya tidak terlepas dari layanan yang masing-masing biro berikan, adapun layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah meliputi pelayanan di bidang; pemerintahan dan kesra, hukum, perekonomian dan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, organisasi serta administrasi, keuangan dan pelayanan umum. Gambaran pelayanan dari 6 Biro yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

**Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat. Kinerja pelayanan yang dilaksanakan:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait;

**Biro Hukum**

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum. Jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;



- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum.

### **Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas tugas Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan. Jenis kinerja pelayanan yang dilaksanakan adalah:

- a. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan

### **Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Jenis layanan yang dilaksanakan adalah:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

### **Biro Organisasi**

Biro Organisasi sebagaimana mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana, Jenis layanan yang dilaksanakan adalah:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- c. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;

### **Biro Umum**

Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan. Jenis layanan yang dilaksanakan adalah:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan serta Pelayanan Administrasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Optimalnya Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum
		Optimalnya Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
		Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa
		Optimalnya Penataan Kelembagaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah
		Optimalnya Pelayanan Pimpinan dan Administrasi Umum

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024**

Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Lampiran I tentang Matrik Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.

Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Sub. Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan perundang undangan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana termuat pada lampiran.







## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

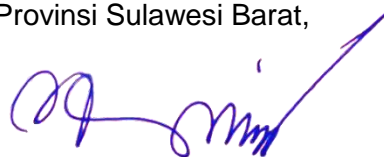
1. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengupayakan secara optimal melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2023-2026.
2. Selanjutnya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan segera menyusun RKA dan DPA Tahun 2024 dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat secara berkala melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Kerja tersebut baik triwulan maupun semesteran.
4. Agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat.

### 5.2 Penutup

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 ini, memuat tujuan dan sasaran dan evaluasi kerja tahun sebelumnya. Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Berhasil atau tidaknya suatu Rencana Kerja bukan hanya pada perumusannya saja akan tetapi pada saat diimplementasikan oleh seluruh elemen Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah  
Provinsi Sulawesi Barat,



Dr. MUHAMMAD IDRIS, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama  
NIP. : 19640015 199303 1 001



**Tabel T-C.33.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Provinsi Sulawesi Barat**

Nama OPD : Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Lampiran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						20.174.000.000,00							21.150.382.000,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH						20.174.000.000,00							21.150.382.000,00	
1. 4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						775.000.000,00							2.138.791.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			<i>Nilai SAKIP Lingkup OPD (poin)</i>				75,5									
			<i>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persentase)</i>				100									
			<i>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (poin)</i>				70									
			<i>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persentase)</i>				98,99									
4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						131.869.000,00							438.690.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						65.700.000,00							256.430.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>				3	65.700.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Pemerintahan dan Kesra			
4.01.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						9.987.000,00							23.120.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			<i>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>				1	9.987.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Pemerintahan dan Kesra			
4.01.01.1.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						11.250.000,00							28.300.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			<i>Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>				1	11.250.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Pemerintahan dan Kesra			
4.01.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.430.000,00							6.150.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			<i>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>				1	3.430.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Pemerintahan dan Kesra			
4.01.01.1.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.432.000,00							7.150.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			<i>Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)</i>				1	4.432.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Pemerintahan dan Kesra			
4.01.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						33.650.000,00							61.230.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)</i>				1	33.650.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Pemerintahan dan Kesra			
4.01.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.420.000,00							56.310.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			<i>Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)</i>				2	3.420.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Pemerintahan dan Kesra			

4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.973.000,00							13.330.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.540.000,00							5.210.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		<i>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>				1	2.540.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						4.433.000,00							8.120.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		<i>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>				3	4.433.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Biro Pemerintahan dan Kesra		
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						66.940.000,00							278.969.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						35.340.000,00							79.640.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		<i>Penyusunan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>				1	35.340.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Biro Pemerintahan dan Kesra		
4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						31.600.000,00							199.329.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</i>				3	31.600.000,00	(Luar dan Dalam Daerah, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Biro Pemerintahan dan Kesra		Pegawai Biro Pemerintahan dan Kesra
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						372.658.000,00							990.839.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						85.400.000,00							168.900.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</i>				2	85.400.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Biro Pemerintahan dan Kesra		
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						26.100.000,00							66.700.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>				2	26.100.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Biro Pemerintahan dan Kesra		
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						55.870.000,00							122.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)</i>				2	55.870.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Biro Pemerintahan dan Kesra		
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.638.000,00							613.240.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>				2	200.638.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Biro Pemerintahan dan Kesra		Pegawai Biro Pemerintahan dan Kesra
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						4.650.000,00						Penguatan Sistem Pemerintahan	19.999.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)</i>				1	4.650.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Biro Pemerintahan dan Kesra		
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						55.430.000,00							89.540.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						55.430.000,00							89.540.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>			4	55.430.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Pemerintahan dan Kesra		
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.130.000,00					327.423.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jahatan		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>			3	97.700.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Pemerintahan dan Kesra	201.201.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>			9	25.890.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Pemerintahan dan Kesra	69.490.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>			5	17.540.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Pemerintahan dan Kesra	56.732.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. 4.01.03	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>		<b><i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Persentase)</i></b>			100	1.500.000.000,00				<b>Biro Pemerintahan dan Kesra</b>	2.928.551.000,00	<b>Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan						584.650.000,00					1.303.950.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		<i>Rapat Penyusunan LKPJ (Dokumen)</i>			1	165.230.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	631.700.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		<i>Rapat Penerapan SPM (Dokumen)</i>			1	209.650.000,00	(Makassar, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	382.130.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah		<i>Rapat Penataan Batas Wilayah (Dokumen)</i>			1	209.770.000,00	(Pasangkayu, KAB. PASANGKAYU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Urusan Pengampuh SPM Provinsi dan Kabupaten OPD Pemkab terkait serta Pihak Ketiga	290.120.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah						750.000.000,00					1.409.171.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		<i>Fasilitasi Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)</i>			2	269.870.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD	733.421.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		<i>Rapat Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan (Dokumen)</i>			2	101.210.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD Pemerintah Provinsi dan Kaupaten	200.320.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						378.920.000,00				Pemerintah Provinsi dan Kaupaten	475.430.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

			Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD (Orang)			58	234.600.000,00	(Makassar, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD Provinsi dan Kabupaten		
			Monev LPPD Provinsi dan Kabupaten (Dokumen)			1	144.320.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD Provinsi dan Kabupaten		
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						165.350.000,00					215.430.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah						165.350.000,00					215.430.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Rapat Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah (Dokumen)			1	165.350.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD Teknis terkait dan Pihak Ketiga		
3. 4.01.04	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>						<b>17.899.000.000,00</b>					<b>16.083.040.000,00</b>	<b>Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>
			<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat (Persentase)</b>			<b>100</b>					<b>OPD Teknis terkait dan Pihak Ketiga</b>		
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual						15.873.100.000,00					15.472.400.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual						10.716.860.000,00					11.532.900.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			BIRO PEMKESRA - Bantuan Kegiatan Keagamaan lainnya (Paket)			1	25.000.000,00	(Kecamatan Balanipa, Kelurahan/Desa Balanipa, KAB. PANGAJENE	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengurus Rumah Ibadah		
			BIRO PEMKESRA - Bantuan Kegiatan Keagamaan lainnya (Kegiatan)			1	25.000.000,00	(Kecamatan dapurang, Kelurahan/Desa dusun funi desa (Kecamatan Alu, Kelurahan/Desa Kelurahan Petoosang, KAB. PANGAJENE	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengurus Rumah Ibadah		
			BIRO PEMKESRA - Bantuan Kegiatan Keagamaan lainnya (Unit)			1	25.000.000,00	(Kecamatan Alu, Kelurahan/Desa Kelurahan Petoosang, KAB. PANGAJENE	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rumah Ibadah		
			BIRO PEMKESRA - Bantuan Kegiatan Keagamaan lainnya (Unit)			1	25.000.000,00	(Kecamatan Tapalang, Kelurahan/Desa Kelurahan Petoosang, KAB. PANGAJENE	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengurus Rumah Ibadah		
			BIRO PEMKESRA - Bantuan Kegiatan Keagamaan lainnya (Unit)			1	25.000.000,00	(Kecamatan Campalagian, Kelurahan/Desa Kenje, KAB. PANGAJENE	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengurus Rumah Ibadah		
			BIRO PEMKESRA - Bantuan Kegiatan Keagamaan lainnya (Kegiatan)			1	25.000.000,00	(Kecamatan simboro, Kelurahan/Desa kel simboro, KAB. PANGAJENE	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengurus Rumah Ibadah		
			BIRO PEMKESRA - Bantuan Rumah Ibadah (Unit)			1	25.000.000,00	(Kecamatan BONEHAU, Kelurahan/Desa BUTTUADA, KAB. PANGAJENE	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengurus Rumah Ibadah		
			BIRO PEMKESRA - Bantuan Rumah Ibadah (Unit)			1	25.000.000,00	(Kecamatan Alu, Kelurahan/Desa Pao pao, KAB. PANGAJENE	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengurus Rumah Ibadah		
			BIRO PEMKESRA - Bantuan Rumah Ibadah (Unit)			1	25.000.000,00	(Kecamatan dapurang, Kelurahan/Desa dusun kasalai desa Desa Peburru, Dusun London, KAB. PANGAJENE	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengurus Rumah Ibadah		
			BIRO PEMKESRA - Bantuan Rumah Ibadah (Unit)			1	25.000.000,00	(Kecamatan Mamuju, Kelurahan/Desa Binanoa, KAB. PANGAJENE	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengurus Rumah Ibadah		
			BIRO PEMKESRA - Bantuan Rumah Ibadah (Unit)			1	25.000.000,00	(Kecamatan , Kelurahan/Desa kompleks graha pelabuhan permai (maspol), KAB. PANGAJENE	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengurus Rumah Ibadah		







			BIRO PEMKESRA - Bantuan Rumah Ibadah (Unit)			1	25.000.000,00	(Kecamatan Tinambung, Kelurahan/Desa Dusun Ga&de Desa Tangga-tangga, K.A.D. DPN EMMAI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengurus Rumah Ibadah		
			Hibah Rumah Ibadah (Tahun)			1	8.750.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengurus Rumah Ibadah		
			Monitoring dan Evaluasi Rumah Ibadah (Unit)			300	363.450.000,00	(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penerima Hibah		
			Verifikasi Rumah Ibadah (Unit)			750	353.410.000,00	(6 Kabupaten se-Sulbar, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Calon Penerima Hibah		
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual						5.156.240.000,00				Calon Penerima Hibah	3.939.500.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Badan Amil Zakat Nasional Prov, Sulbar (Tahun)			1	500.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengurus Baznas		
			Dzikir Akhir Tahun (Kegiatan)			1	273.240.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat Sulawesi Barat		
			Fasilitasi Kegiatan Keagamaan (Kegiatan)			4	384.300.000,00	(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat Sulawesi Barat		
			Fasilitasi MTQ Tingkat Nasional (Kegiatan)			1	1.500.000.000,00	(Luar Sulbar, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Juara MTQ Tk. Provinsi		
			Lomba Beduk dan Takbiran Remaja Masjid se Sulawesi Barat (Kegiatan)			1	200.500.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat Sulawesi Barat		
			LPTQ Provinsi Sulawesi Barat (Tahun)			1	225.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengurus LPTQ Provinsi Sulawesi Barat		
			Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi (Kegiatan)			1	1.250.000.000,00	(Pasangkayu, KAB. PASANGKAYU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat Sulawesi Barat		
			Pembinaan Manajemen Pengelolaan Masjid (Kegiatan)			1	248.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengurus Masjid se Sulawesi Barat		
			Pertemuan Tokoh Lintas Agama (kegiatan)			1	300.200.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tokoh Agama se Sulawesi Barat		
			PESPAANI (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Umat Kristen se Sulawesi Barat		
			PESPARAWI (Kegiatan)			1	100.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Umat Kristen Sulawesi Barat		
			PW. Muhammadiyah Prov. Sulbar (Tahun)			1	75.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengurus PW. Muhammadiyah Prov. Sulbar		
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar						25.000.000,00					300.540.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan						25.000.000,00					300.540.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)			1	25.000.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD Provinsi dan Kabupaten yang terkait		
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar						2.000.900.000,00					310.100.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata						2.000.900.000,00					310.100.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Fasilitasi Beasiswa Pendidikan Tinggi (Tahun)			1	1.650.000.000,00	(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mahasiswa dan Pihak terkait		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)			1	350.900.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD Provinsi dan Kabupaten yang terkait		



4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00	2.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)		Sekretariat Daerah Biro Hukum	1.00	10.000.000,00	Biro Hukum	
		Penyusunan Perubahan RKA (Dokumen)			1	2.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM	Sekretariat Daerah Biro Hukum				
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00	2.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)		Sekretariat Daerah Biro Hukum	1.00	10.000.000,00	Biro Hukum	
		Penyusunan Dokumen DPA (Dokumen)			1	2.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM	Sekretariat Daerah Biro Hukum				
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00	2.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)		Sekretariat Daerah Biro Hukum	1.00	10.000.000,00	Biro Hukum	
		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA (Dokumen)			1	2.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM	Sekretariat Daerah Biro Hukum				
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.00	2.00	2.00	86.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)		Sekretariat Daerah Biro Hukum	2.00	80.000.000,00	Biro Hukum	
		Pembayaran Honorarium Operator (Orang)			7	82.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM	Sekretariat Daerah Biro Hukum				
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Laporan)			1	2.000.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM	Sekretariat Daerah Biro Hukum				
		Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Laporan)			1	2.000.000,00	(Penyusunan laporan ikhtisar realisasi kinerja,	DANA UMUM	Sekretariat Daerah Biro Hukum				
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.00	4.00	4.00	2.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)		Sekretariat Daerah Biro Hukum	4.00	10.000.000,00	Biro Hukum	
		Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Biro Hukum (Dokumen)			4	2.500.000,00	(Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Biro Hukum, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM	Sekretariat Daerah Biro Hukum				
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				48.100.000,00						85.000.000,00	Biro Hukum	

4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		3.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)				1.00	10.000.000,00	Biro Hukum	
		Melakukan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				100	3.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM						
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		3.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)					1.00	10.000.000,00	Biro Hukum
		Melakukan Penyediaan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Biro Hukum (Dokumen)				1	3.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM						
4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		3.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)					1.00	10.000.000,00	Biro Hukum
		Melakukan Penyediaan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Biro Hukum (Dokumen)				1	3.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM						
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.00	1.00	1.00		32.600.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)					1.00	25.000.000,00	Biro Hukum
		Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro Hukum (Laporan)				1	6.200.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM						
		Pembayaran Honorarium Operator (Orang)				1	26.400.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM						
4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.00	1.00	1.00		2.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)					1.00	10.000.000,00	Biro Hukum
		Melakukan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				1	2.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM						
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						2.500.000,00							10.000.000,00	Biro Hukum

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		3.00	3.00	3.00		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)			Sekretariat Daerah Biro Hukum	3.00		
			Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Hukum (Laporan)				3	2.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)	DANA UMUM		Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		1.00	1.00	1.00		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)			Sekretariat Daerah Biro Hukum	1.00	10.000.000,00	Biro Hukum
			Melakukan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Biro Hukum (Dokumen)				1		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)	DANA UMUM		Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							7.298.121,00						100.000.000,00	Biro Hukum
4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)				1.00	25.000.000,00	Biro Hukum
			Melakukan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Biro Hukum (Dokumen)				1		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)	DANA UMUM		Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		0.00	0.00	1		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)			Sekretariat Daerah Biro Hukum	1.00	25.000.000,00	Biro Hukum
			Melakukan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Biro Hukum (Laporan)				1		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)	DANA UMUM		Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		0.00	0.00	1		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)			Sekretariat Daerah Biro Hukum	1.00	25.000.000,00	Biro Hukum
			Melakukan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Biro Hukum (Laporan)				1		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)	DANA UMUM		Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1.00	1.00	1.00	7.298.121,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)			Sekretariat Daerah Biro Hukum	1.00	25.000.000,00	Biro Hukum



4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	1.00		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum	1.00	12.000.000,00	Biro Hukum
		Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			1		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)				Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0.00	2.00	3		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum	3.00	51.000.000,00	Biro Hukum
		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)			3		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)				Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0.00	0.00	42		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum	42.00	75.000.000,00	Biro Hukum
		Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			42		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)				Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0.00	0.00	42		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum	42.00	75.000.000,00	Biro Hukum
		Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			42		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)				Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					429.583.700,00							1.660.000.000,00	Biro Hukum
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	1		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)	DANA UMUM				1.00	10.000.000,00	Biro Hukum
		Melakukan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)			1		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARATI)							
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												150.000.000,00	Biro Hukum

4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	1		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)			Sekretariat Daerah Biro Hukum	3.00		
		Melakukan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			1				DANA UMUM		Sekretariat Daerah Biro Hukum		
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.00	1.00	1.00	60.000.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)			Sekretariat Daerah Biro Hukum	1.00	250.000.000,00	Biro Hukum
		Melakukan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)			1	60.000.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)		DANA UMUM		Sekretariat Daerah Biro Hukum		
4.01.01.1.06.0006	Perundang-Undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.00	2.00	2.00	9.075.000,00	(Kabupaten Majene, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)			Sekretariat Daerah Biro Hukum	2.00	200.000.000,00	Biro Hukum
		Melakukan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)			2	9.075.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)		DANA UMUM		Sekretariat Daerah Biro Hukum		
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0.00	0.00	250		(Kabupaten Majene, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)			Sekretariat Daerah Biro Hukum	250.00	50.000.000,00	Biro Hukum
		Melakukan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)			250		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)		DANA UMUM		Sekretariat Daerah Biro Hukum		
4.01.01.1.06.0008	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.00	1	1	82.530.000,00	(Kabupaten Majene, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)			Sekretariat Daerah Biro Hukum	1.00	200.000.000,00	Biro Hukum
		Melakukan Penyediaan Bahan/Material (Paket)			1	82.530.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)		DANA UMUM		Sekretariat Daerah Biro Hukum		
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	70.00	75	80	236.578.700,00	(Kabupaten Majene, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)			Sekretariat Daerah Biro Hukum	85	500.000.000,00	Biro Hukum
										Sekretariat Daerah Biro Hukum			



		Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Laporan)			60	100.000.000,00	(Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, SULAWESI	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum			
		Melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Laporan)			20	136.578.700,00	(Jawa, Sumatera, Bali dan Kalimantan, Luar Wilayah)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1		(Kabupaten Majene, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI				Sekretariat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Biro Hukum	1	150.000.000,00	Biro Hukum
		Melakukan Penatausahaan Arsip Dinamis Biro Hukum (Dokumen)			1		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	1.00	41.400.000,00	(Kabupaten Majene, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI				Sekretariat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Biro Hukum	1.00	150.000.000,00	Biro Hukum
		Melaksanakan dan melaporkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Biro Hukum (Dokumen)			1	4.800.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum			
		Pembayaran Honorarium Tim SPBE Biro Hukum (Orang)			8	36.600.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum			
		Pengadaan Perangkat SPBE (Paket)			1		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					77.000.000,00							320.000.000,00	Biro Hukum
4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	2		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI					2	60.000.000,00	Biro Hukum
		Melakukan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Roda 2) (Unit)			2		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	2		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI				Sekretariat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Biro Hukum	2	40.000.000,00	Biro Hukum
		Melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Roda 2) (Unit)			2		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum			

4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	1		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)			Sekretariat Daerah Biro Hukum	1	10.000.000,00	Biro Hukum	
		Melakukan Pengadaan Mebel (Paket)			1		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Sekretariat Daerah Biro Hukum				
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	15	10	77.000.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)			Sekretariat Daerah Biro Hukum	10	100.000.000,00	Biro Hukum	
		Melakukan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			6	77.000.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Sekretariat Daerah Biro Hukum				
4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	1		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)			Sekretariat Daerah Biro Hukum	1	10.000.000,00	Biro Hukum	
		Melakukan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit)			1		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Sekretariat Daerah Biro Hukum				
4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	3		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)			Sekretariat Daerah Biro Hukum	4	100.000.000,00	Biro Hukum	
		Melakukan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)			3		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Sekretariat Daerah Biro Hukum				
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.029.500,00						100.000.000,00	Biro Hukum	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	8.029.500,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)				1	100.000.000,00	Biro Hukum	
		Melakukan Pelayanan Surat Menyurat (Laporan)			1	3.029.500,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Sekretariat Daerah Biro Hukum				
		Pembayaran BPJS TATT (Orang)			28	5.000.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Sekretariat Daerah Biro Hukum				
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					149.470.000,00						260.000.000,00	Biro Hukum	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					107.080.000,00						75.000.000,00	Biro Hukum	

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	11	11		(Pembayaran BPJS TATT, SULAWESI BARAT)				11		
			Melakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			11	87.880.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum		
			Pembayaran Hanorarium Sopir (Orang)			1	19.200.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum		
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13	13	26.900.000,00	(Pembayaran BPJS TATT, SULAWESI BARAT)				Sekretariat Daerah Biro Hukum	60.000.000,00	Biro Hukum
			Melakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)			13	26.900.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum		
4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0.00	0.00	6		(Pembayaran BPJS TATT, SULAWESI BARAT)				Sekretariat Daerah Biro Hukum	25.000.000,00	Biro Hukum
			Melakukan Pemeliharaan Mebel (Unit)			6		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum		
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	50		(Pembayaran BPJS TATT, SULAWESI BARAT)				Sekretariat Daerah Biro Hukum	50.000.000,00	Biro Hukum
			Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			50		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum		
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	0.00	5	10.000.000,00	(Pembayaran BPJS TATT, SULAWESI BARAT)				Sekretariat Daerah Biro Hukum	25.000.000,00	Biro Hukum
			Melakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi terhadap Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			5	10.000.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum		
4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11	6	6	5.490.000,00	(Pembayaran BPJS TATT, SULAWESI BARAT)				Sekretariat Daerah Biro Hukum	25.000.000,00	Biro Hukum
			Melakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi terhadap Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			6	5.490.000,00	(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum		
2. 4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						821.320.430,00						1.630.000.000,00	Biro Hukum

			Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum (Persentase)				100							Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan								524.364.200,00							940.000.000,00	Biro Hukum
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum								141.717.000,00							220.000.000,00	Biro Hukum
	Pengaturan																
		Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)		58.00	40.00	35.00				(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)					50.00		
		Melakukan Penyusunan Peraturan Daerah (Dokumen)				5		80.000.000,00		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum			
		Melakukan Penyusunan Peraturan Gubernur (Dokumen)				30		61.717.000,00		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum								90.979.900,00							190.000.000,00	Biro Hukum
	Penetapan																
		Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)		491	520	470				(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)					530		
		Melakukan Penyusunan Keputusan Gubernur (Dokumen)				470		90.979.900,00		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya								84.675.700,00							170.000.000,00	Biro Hukum
		Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya (Dokumen)		673	600	540				(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)					625		
		Melakukan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pelayanan Informasi Hukum (Dokumen)				500		50.000.000,00		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum			
		Melakukan Penyusunan Naskah Hukum Lainnya (Dokumen)				40		34.675.700,00		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota								206.991.600,00							360.000.000,00	Biro Hukum
		Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)		239	141	135				(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)					153		
		Melakukan Fasilitasi dan Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)				135		206.991.600,00		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Sekretariat Daerah Biro Hukum			
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum								296.956.230,00							690.000.000,00	Biro Hukum
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum								192.063.400,00							500.000.000,00	Biro Hukum

4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	2.00	3	2		(Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Desa/Kelurahan Rangas, SULAWESI BARAT)					4			
		Melakukan Fasilitasi/Pendampingan Penyelesaian Perkara di Lembaga Peradilan (Kasus)			2		192.063.400,00		DANA UMUM						
		Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	2.00	2.00	2.00		104.892.830,00							190.000.000,00	Biro Hukum
		Melakukan Fasilitasi Pelaporan Aksi HAM (Laporan)			4	19.892.830,00		DANA UMUM							
		Melakukan Fasilitasi/Pendampingan Penyelesaian Perkara di Luar Lembaga Peradilan (Kasus)			2	85.000.000,00		DANA UMUM							
<b>J U M L A H</b>						<b>1.713.901.751,00</b>							<b>4.693.000.000,00</b>		

**Nama OPD : Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.109.601.092,00							3.334.972.916,29	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH						2.109.601.092,00							3.334.972.916,29	
1. 4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						837.932.442,00							2.038.325.076,19	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
			Nilai SAKIP Lingkup OPD (poin)				65									
			Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persentase)				100									
			Nilai Raport SPBE Lingkup OPD (poin)				75									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persentase)				95									
			Nilai SAKIP Lingkup OPD (poin)				65									
			Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persentase)				100									
			Nilai Raport SPBE Lingkup OPD (poin)				75									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persentase)				95									
4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						139.547.164,00							66.545.320,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						48.437.164,00				Penguatan Akuntabilit			47.672.660,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

			Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD (Dokumen)			2	48.437.164,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Laporan LKJIP dan RB SKPD (Dokumen)			2	91.110.000,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Akuntabilit	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	18.872.660,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						69.900.000,00						71.789.015,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			3	69.900.000,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Akuntabilit	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	71.789.015,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.000.000,00						28.777.667,94	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Penyediaan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)			1	3.000.000,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Akuntabilit as Kinerja	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	28.777.667,94	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						63.595.000,00						71.616.626,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)			50	43.695.000,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Manajemen Sumber Daya Aparatur	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	35.808.313,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Mengikuti Bimbingan Teknis/Pelatihan dan Diklat Struktural/Fungsional (Orang)			2	19.900.000,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Manajemen Sumber Daya	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	35.808.313,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						417.748.778,00						1.507.725.242,66	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			1	121.685.436,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Sistem Pemerintahan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	290.000.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Kudapan dan Makan Minum Jamuan Tamu Eselon II (Paket)			1	37.000.000,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	162.513.300,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen/Laporan (Paket)			2	10.045.872,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	162.513.250,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material		Penyediaan Bahan/Material Penunjang Kantor (Paket)			1	21.024.950,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	162.513.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						195.422.520,00				Peningkatan Kualitas Pelayanan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	567.672.393,17	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

			Mengikuti Rapat Koordinasi/Konsultasi dan Pemenuhan Undangan (Laporan)			30	195.422.520,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website (Dokumen)			1	15.900.000,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Sistem Pemerintahan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		162.513.299,49	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung SPBE dan Pengadministrasiannya (Dokumen)			1	16.670.000,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6.641.500,00							7.858.213,29	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel		Pengadaan Interior dan Mebel Ruang Rapat (Paket)			1	6.641.500,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		7.858.213,29	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.000.000,00							162.513.299,49	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Laporan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			1	3.000.000,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		162.513.299,49	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						134.500.000,00							121.499.691,81	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jahatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			12	124.000.000,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		100.000.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			4	10.500.000,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		21.499.691,81	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
2.	4.01.06	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)			100						<b>Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan</b>		<b>946.647.840,10</b>	<b>Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan</b>
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)			100						<b>Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan</b>			
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian						487.438.750,00							420.552.010,10	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Fasilitasi dan Pelaksanaan Rakor dan HLM TPID (Dokumen)			3	342.438.850,00	(Kabupaten se-Sulbar, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang	Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk	Perangkat Daerah Teknis, Tim TPID se-Sulbar		160.552.010,10	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro						144.999.900,00				Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk	Perangkat Daerah Teknis, Tim TPID se-Sulbar		260.000.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
					4	60.000.000,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Pegawai Tidak Tetap (PTT)			
					1	84.999.900,00	(Mamuju atau salah satu Kabupaten yang disepakati pelaksanaannya dengan CUK, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				OJK, Perangkat Daerah Teknis Provinsi dan Kabupaten			
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					74.999.900,00								60.000.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					74.999.900,00								60.000.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
					4	74.999.900,00	(Kabupaten se-Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					370.000.000,00								466.095.830,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha					106.037.100,00								100.000.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
					2	57.483.800,00	(Semua Kabupaten/Kota, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Peningkatan Kerjasama Investasi dan Pengembangan Dunia	BUMD Perseroda dan Perumda		
					4	48.553.300,00	(Semua Kabupaten/Kota, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					BUMD Perseroda dan Perumda		
4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi					103.962.900,00								236.095.830,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
					1	39.036.200,00	(Kabupaten se-Sulbar, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Peningkatan Kerjasama Investasi dan Pengembangan Dunia	BUMD Perseroda dan Perumda		
					4	64.926.700,00	(Semua Kabupaten/Kota, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					PDAM dan Perangkat Daerah terkait		
4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah					160.000.000,00								130.000.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
					4	60.000.000,00	(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Peningkatan Kerjasama Investasi dan Pengembangan Dunia	PDAM, Perangkat Daerah terkait		
					4	100.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Pegawai Tidak Tetap (PTT)		
3. 4.01.08	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>					<b>339.230.000,00</b>								<b>350.000.000,00</b>	<b>Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan</b>







			Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			4	59.200.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa			
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.000.000,00						60.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	5.000.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)			1		30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			1	5.000.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa			
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	2	2	5.000.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)			2		30.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			2	5.000.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa			
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00						260.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0.00	0	75		(Mamuju, KAB. MAMUJU)			75		85.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) (Paket)			75		(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa			
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0.00	18	30	50.000.000,00	(Makassar, Jakarta, Luar Wilayah)			30		175.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Pengembangan Kompetensi Pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)			10	50.000.000,00	(Makassar, Jakarta, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa			
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						411.000.000,00						535.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30	30	30	94.000.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)			30		110.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Paket)			30	94.000.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa			
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10	10	17.000.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)			10		25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)			10	17.000.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa			
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	40	40	40	100.000.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)			40		100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Tersedianya Bahan/Material (Paket)			40	100.000.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa			

4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) Koordinasi dan Konsultasi ke LKPP, Kementerian dan Kabupaten Sulawesi Barat (Laporan)	40	40	40	200.000.000,00	(Kabupaten Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT) (Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa	40	300.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000,00					100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) Pengadaan Sepeda Motor (Unit)	0.00	1	1		(Mamuju, KAB. MAMUJU)			1	40.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket) Pengadaan Meja dan Kursi (Buah)	0.00	10.00	10.00		(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa	10.00	20.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	0.00	4.00	3.00	70.000.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa	5.00	40.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.200.000,00					15.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) Tersedianya Laporan Surat Menyurat (Laporan)	1	4	4	12.200.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4	15.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					123.320.000,00					160.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas dan dibayarkan pajaknya (Unit)	0.00	3.00	3.00	78.080.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.00	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	6	7	45.240.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7	60.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2. 4.01.07	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					<b>1.742.011.364,00</b>					<b>2.180.000.000,00</b>	<b>Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>



			Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)			30	177.800.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa				
4.01.07.1.03.0002		Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa					122.800.000,00					Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa		200.000.000,00		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)		1	3		(Mamuju, KAB. MAMUJU)				Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3			
			Kematangan Kelembagaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, MCP KPK dan Anjab ABK (Dokumen)				122.800.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa				
4.01.07.1.03.0003		Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa					262.200.000,00					Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa		310.000.000,00		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)		1	3		(Mamuju, KAB. MAMUJU)				Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3			
			Pendampingan kepada Pelaku Pengadaan, Clearing House dan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)				262.200.000,00	(Mamuju, KAB. MAMUJU)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah lingkup Pemprov. Sulbar, UKPBJ Kabupaten dan Provinsi dan Pelaku				
<b>J U M L A H</b>								2.578.531.364,00						3.515.000.000,00		

**Nama OPD : Biro Organisasi**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.209.522.122,00							3.223.000.000,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH						2.209.522.122,00							3.223.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.074.932.421,00							1.602.000.000,00	Biro Organisasi
			Nilai SAKIP Lingkup OPD (poin)				89									
			Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persentase)				100									
			Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (poin)				75									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persentase)				97									
4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						379.716.260,00							355.000.000,00	Biro Organisasi
			Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD (poin)				28		(Kompleks Kantor Gubernur Prov. Sulbar, KAB.				28.50			
			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD (poin)				24		(Kompleks Kantor Gubernur Prov. Sulbar, KAB.				26			
			Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD (poin)				14.70		(Kompleks Kantor Gubernur Prov. Sulbar, KAB.				14.90			
			Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD (poin)				18		(Kompleks Kantor Gubernur Prov. Sulbar, KAB.				22			
4.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						136.056.060,00							90.000.000,00	Biro Organisasi

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	2.00		(Mamuju, SULAWESI BARAT)				2.00		
		Melaksanakan Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan (Laporan)			1	24.014.015,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
		Melakukan finalisasi penyusunan dokumen perencanaan (Dokumen)			2	34.014.015,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
		Melakukan Koordinasi, Verifikasi dan Validasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokumen)			2	44.014.015,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
		Menyusun rancangan dokumen perencanaan (Dokumen)			2	34.014.015,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.00	2.00	2.00	165.548.600,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2.00	175.000.000,00	Biro Organisasi
		Koordinasi dan Konsultasi Peny. Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Laporan)			1	70.548.600,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
		Melaksanakan Rapat Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Laporan)			1	20.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
		Melakukan evaluasi capaian kinerja (Laporan)			1	60.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
		Menyusun laporan capaian kinerja bulanan/triwulan/tahunan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Laporan)			1	15.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.00	4.00	4.00	78.111.600,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	4.00	90.000.000,00	Biro Organisasi
		Melakukan proses identifikasi (Laporan)			1	20.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
		Melakukan Rapat Internal (Laporan)			1	10.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
		Mengumpulkan data dan bahan (Data)			1	15.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
		Menyusun dokumen evaluasi kinerja (evaluasi renja, evaluasi renstra, evaluasi fisik keuangan, evaluasi IKU) (Dokumen)			1	33.111.600,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persentase)			100	56.370.000,00	(Kompleks Kantor Gubernur Prov. Sulbar, KAB.				100	210.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0.00	2	2.00	10.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)				2.00	50.000.000,00	Biro Organisasi
		Melakukan evaluasi terhadap sarana prasarana peningkatan disiplin pegawai (Laporan)			1	1.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
		Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana peningkatan disiplin pegawai (Laporan)			1	1.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
		Pemeliharaan sarana prasarana peningkatan disiplin pegawai (Laporan)			1	1.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			

			Penyediaan sarana prasarana peningkatan disiplin pegawai (Laporan)			1	7.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0.00	53	53.00	31.370.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	53.00	90.000.000,00	Biro Organisasi
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Orang)			29	31.370.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		ASN Lingkup Biro Organisasi			
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	12	12.00	15.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)			ASN Lingkup Biro Organisasi ASN Lingkup Biro Organisasi	14	70.000.000,00	Biro Organisasi
			Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan diklat (Laporan)			1	1.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		ASN Lingkup Biro Organisasi			
			Mengajukan peserta pendidikan dan pelatihan (Laporan)			1	1.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		ASN Lingkup Biro Organisasi			
			Mengikuti pendidikan dan pelatihan (Laporan)			1	13.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		ASN Lingkup Biro Organisasi			
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persentase)			100	437.727.381,00	(Kompleks Kantor Gubernur Prov. Sulbar, KAB.				100	747.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10.00	10.00	4.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)				10.00	90.000.000,00	Biro Organisasi
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)			1	4.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Biro Organisasi			
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10.00	10.00	10.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)			Biro Organisasi Biro Organisasi	10.00	30.000.000,00	Biro Organisasi
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Laporan)			1	10.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Biro Organisasi			
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	300	300.00	300.00	40.069.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)			Biro Organisasi Biro Organisasi	300.00	70.000.000,00	Biro Organisasi
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dokumen)			1	40.069.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Biro Organisasi			
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	80	80.00	80.00	26.700.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)			Biro Organisasi Biro Organisasi	80.00	35.000.000,00	Biro Organisasi
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Laporan)			1	26.700.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Biro Organisasi			
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	60.00	60.00	60.00	77.607.901,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)			Biro Organisasi Biro Organisasi	60.00	90.000.000,00	Biro Organisasi
			Penyediaan Bahan/Material (Laporan)			1	77.607.901,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Biro Organisasi			
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	70	70.00	70.00	220.805.862,00	(Dalam dan luar wilayah Sulawesi barat, SULAWESI			Biro Organisasi Biro Organisasi	70.00	310.000.000,00	Biro Organisasi



			Melaksanakan koordinasi/konsultasi/ monitoring dan evaluasi (Laporan)			2	217.805.862,00	(Dalam dan Luar Wilayah Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		ASN Lingkup Biro Organisasi			
			Membuat laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd (Laporan)			1	2.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		ASN Lingkup Biro Organisasi			
			Mengidentifikasi dasar pelaksanaan perjalanan dinas (Dokumen)			1	1.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		ASN Lingkup Biro Organisasi			
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	10	10.00	10.00	4.244.618,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)			ASN Lingkup Biro Organisasi ASN Llingkup Biro Organisasi	10.00	20.000.000,00	Biro Organisasi
			Membuat daftar kebutuhan penatausahaan arsip dinamis (Dokumen)			1	1.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Biro Organisasi			
			Membuat laporan penatausahaan arsip dinamis (Laporan)			1	1.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Biro Organisasi			
			Menerima dan memeriksa hasil pekerjaan (Dokumen)			1	2.244.618,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Biro Organisasi			
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0.00	1	1.00	54.300.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)			Biro Organisasi	1.00	102.000.000,00	Biro Organisasi
			Melakukan analisis rencana kebutuhan (Laporan)			1	5.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Biro Organisasi			
			Membuat laporan (Laporan)			1	2.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Biro Organisasi			
			Menyiapkan dokumen permintaan sesuai kebutuhan (Dokumen)			1	47.300.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Biro Organisasi			
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)			100	25.278.750,00	(Kompleks Kantor Gubernur Prov. Sulbar, KAB. MAMUJU)				100	40.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	15	15.00	15.00	25.278.750,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)				15.00	40.000.000,00	Biro Organisasi
			Pengadaan Mebel (Laporan)			1	25.278.750,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Biro Organisasi			
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)			100	66.124.630,00	(Kantor Gubernur Prov. Sulbar, KAB. MAMUJU)				100	80.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.00	2.00	2.00	66.124.630,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)				2.00	80.000.000,00	Biro Organisasi
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			2	66.124.630,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Biro Organisasi			
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)			100	109.715.400,00	(Kompleks Kantor Gubernur Prov. Sulbar, KAB. MAMUJU)				100	170.000.000,00	Biro Organisasi
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau I anannan						88.050.000,00						110.000.000,00	Biro Organisasi

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		13.00	13.00	13.00		(Mamuju, SULAWESI BARAT)			13.00				
			Melakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapngan (Laporan)				1	85.050.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Kendaraan Dinas Lingkup Biro Organisasi			
			Melakukan pencatatan atas kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (Laporan)				1	1.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Kendaraan Dinas Lingkup Biro Organisasi			
			Mengajukan permintaan biaya (Dokumen)				1	2.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Kendaraan Dinas Lingkup Biro Organisasi			
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		0.00	5.00	5.00	21.665.400,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)				Kendaraan Dinas Lingkup Biro Organisasi	60.000.000,00	Biro Organisasi	
			Melakukan pendataan atas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya (Laporan)				1	1.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		5.00	Kendaraan Dinas Lingkup Biro Organisasi			
			Melakukan permintaan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya (Dokumen)				1	19.665.400,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Gedung Kantor Biro Organisasi			
			Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan (Laporan)				1	1.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Gedung Kantor Biro Organisasi			
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 10 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP (Persentase)				100	1.134.589.701,00					Gedung Kantor Biro Organisasi		1.621.000.000,00	Biro Organisasi
			Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Mmimal B+ (Persentase)				33,33						Gedung Kantor Biro Organisasi			
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada (Persentase)				85	484.805.441,00	(Kompleks Kantor Gubernur Prov. Sulbar, KAB. MAMAJU)			90		606.000.000,00	Biro Organisasi	
			Indeks Kematangan Organisasi (poin)				37,1 - 46		(Kompleks Kantor Gubernur Prov. Sulbar, KAB. MAMAJU)			37,1 - 46				
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)		1.00	1.00	1.00	196.626.950,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)			1.00		214.000.000,00	Biro Organisasi	
			Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait (Laporan)				3	96.626.950,00	(DKI Jakarta, Luar Wilayah)	DANA UMUM			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
			Melakukan penataan kelembagaan berdasarkan hasil monev kelembagaan (Dokumen)				1	50.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
			Melakukan penyesuaian regulasi berdasarkan hasil penataan kelembagaan (Dokumen)				1	50.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)		6.00	6.00	6.00	110.455.391,00	(Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar, Mamasa)			6.00		212.000.000,00	Biro Organisasi	
			Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait (Laporan)				6	50.455.391,00	(DKI Jakarta, Luar Wilayah)	DANA UMUM			Pemerintah Kabupaten Lingkup Pemprov. Sulbar			

4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Melakukan monev kelembagaan ke kabupaten (Laporan)			6	50.000.000,00	(Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar dan	DANA UMUM	Pemerintah Kabupaten Lingkup Pemprov. Sulbar					
		Memberikan rekomendasi terkait usulan perubahan penataan kelembagaan (Laporan)			6	10.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM	Pemerintah Kabupaten Lingkup Pemprov. Sulbar					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)		3.00	3.00	3.00		(Mamuju, SULAWESI BARAT)		Pemerintah Kabupaten Lingkup Pemprov. Sulbar Pemerintah Kabupaten Lingkup Pemprov. Sulbar	3.00		180.000.000,00	Biro Organisasi	
	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait (Laporan)				3	57.723.100,00	(DKI Jakarta, Luar Wilayah)	DANA UMUM	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat					
	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait (Laporan)				1	30.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat					
	Menyusun dokumen Anjab, ABK, Peta Jabatan dan Evjab (Dokumen)				4	30.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat					
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada (Persentase)			65		(Kompleks Kantor Gubernur Prov. Sulbar, KAB.			80		1.015.000.000,00	Biro Organisasi	
		Nilai SAKIP Pemprov. (poin)			74		(Kompleks Kantor Gubernur Prov. Sulbar, KAB.			78				
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)		8.00	8.00	8.00		(Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar dan			8.00		230.000.000,00	Biro Organisasi
		Evaluasi rencana kerja dan rencana aksi pelaksanaan RB (Dokumen)				2	20.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat				
		Melakukan Evaluasi Zona Integritas pada OPD (Dokumen)				1	10.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat				
		Monev Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten (Laporan)				6	58.519.260,00	(Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar dan	DANA UMUM	Pemerintah Kabupaten Lingkup Pemprov. Sulbar				
		Monev Pelaksanaan RB Pemprov dan OPD (Dokumen)				1	20.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat				
		Pembinaan Zona Integritas pada OPD (Dokumen)				1	15.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat				
		Penyusunan pergub pedoman evaluasi Zona Integritas (Dokumen)				1	20.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat				
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)		7.00	7.00	7.00		(Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar dan			7.00		210.000.000,00	Biro Organisasi
		Melakukan coaching klinik penyusunan LKjIP dan PK (Dokumen)				2	40.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat				

			Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan dokumen SAKIP Lingkup OPD dan Kabupaten (Dokumen)			7	86.265.000,00	(Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar dan Mamasa)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja						80.000.000,00				Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		160.000.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)		1.00	1.00	1.00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	1.00		
			Bimtek peningkatan kompetensi agen perubahan budaya (Laporan)			1	50.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
			FGD terkait peranan pimpinan sebagai teladan dalam penerapan budaya kerja berAKHLAK (Laporan)			1	10.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
			Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas agen perubahan secara berkala (Data)			1	20.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan						134.966.414,00				Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		180.000.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)		20.00	20.00	30.00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	35.00		
			Evaluasi pergub pakaian dinas (Dokumen)			1	10.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
			Monev penerapan probis lingkup pemprov. Sulbar dan kabupaten sesulbar (Laporan)			6	50.000.000,00	(Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar dan Mamasa)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
			Monev penyusunan SOP lingkup pemprov. Sulbar dan kabupaten sesulbar (Dokumen)			30	74.966.414,00	(Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar dan Mamasa)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik						165.033.586,00				Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		235.000.000,00	Biro Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)		3.00	3.00	3.00	(Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, SULAWESI BARAT)			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	3.00		
			Forum diskusi publik lingkup pemprov. Sulbar (Laporan)			1	20.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
			Kompetisi inovasi pelayanan publik lingkup pemprov. Sulbar (Laporan)			1	50.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
			Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik (SP, SKM dan FKP) (Dokumen)			3	35.000.000,00	(Mamuju, SULAWESI BARAT)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
			Monev pelayanan publik OPD dan Kabupaten (Laporan)			7	60.033.586,00	(Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar dan Mamasa)	DANA UMUM		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat			
<b>J U M L A H</b>								<b>2.209.522.122,00</b>					<b>3.223.000.000,00</b>	

Nama OPD : Biro Umum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						108.960.634.346,00							159.520.793.407,88	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH						108.960.634.346,00							159.520.793.407,88	
1. 4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						108.960.634.346,00							159.520.793.407,88	Biro Umum
			Nilai SAKIP Lingkup OPD (poin)				84									
			Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persentase)				100									
			Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (poin)				4									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persentase)				100									
4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						749.991.450,00							94.249.369,43	Biro Umum
			Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD (poin)				25		(Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas, SULAWESI					26		
			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD (poin)				21		(Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas, SULAWESI					22		
			Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD (poin)				12.5		(Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas, SULAWESI					13		
			Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD (poin)				15		(Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas, SULAWESI					16		
4.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						260.000.000,00							24.399.369,43	Biro Umum
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		6.00	8	8.00		(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI					8.00		
			Penyusunan Renstra, Perubahan Renstra, Renja, Perubahan Renja, IKU, Probis, Rencana Aksi, dan PK (Dokumen)				8	260.000.000,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						43.659.650,00							9.850.000,00	Biro Umum
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	1	1		(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)					1		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				1	43.659.650,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						47.755.000,00							12.900.000,00	Biro Umum
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1	1	1		(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)					1		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)				1	47.755.000,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						16.507.900,00							4.800.000,00	Biro Umum
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	1	1		(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)					1		

			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)			1	16.507.900,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	20.551.350,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)			Biro Umum Sekretariat Daerah	1	7.900.000,00	Biro Umum
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			1	20.551.350,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	2	80.522.000,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)			Biro Umum Sekretariat Daerah	2	13.300.000,00	Biro Umum
			Penyusunan LKJIP dan LPPD (Laporan)			2	80.522.000,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	7	7	280.995.550,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)			Biro Umum Sekretariat Daerah	7	21.100.000,00	Biro Umum
			Evaluasi Renja, Fisik dan Keuangan, RB, LKPJ, Data Sektoral, SPIP, Evaluasi IKU, Evaluasi PK dan SPBE (Laporan)			7	280.995.550,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persentase)			100	29.791.423.773,00	(Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas, SULAWESI)				100	29.049.449.851,42	Biro Umum
			Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD (Persentase)			100		(Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas, SULAWESI BARAT)				100		
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	300	3360	3420	27.751.254.429,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)				3480	28.646.649.851,42	Biro Umum
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Sekretariat (Orang / Bulan)			3.420	27.751.254.429,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	75	75	3	198.522.150,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)			Sekretariat Daerah	3	107.500.000,00	Biro Umum
			Administrasi Penugasan, Usulan Latpim, Usulan Pengembangan SDM (Dokumen)			3	198.522.150,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2267	2400	2450	1.275.738.440,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)			Biro Umum Sekretariat Daerah	2500	159.500.000,00	Biro Umum
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			2.450	1.275.738.440,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	1	354.955.404,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)			Sekretariat Daerah	1	41.800.000,00	Biro Umum
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi (Dokumen)			1	354.955.404,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			

4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	1	2	54.964.170,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)		Biro Umum Sekretariat Daerah Biro Umum Sekretariat Daerah	2	15.600.000,00	Biro Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)			2	54.964.170,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5	5	5	118.897.400,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)		Biro Umum Sekretariat Daerah Biro Umum Sekretariat Daerah	5	52.400.000,00	Biro Umum
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)			5	118.897.400,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum, Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	16	16	16	37.091.780,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)		Biro Umum, Sekretariat Daerah Biro Umum, Sekretariat Daerah	16	26.000.000,00	Biro Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran (Laporan)			16	37.091.780,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD (Persentase)			100	4.432.886.903,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)			100	534.260.019,73	Biro Umum
4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	30	30	30	387.074.027,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)			30	92.300.000,00	Biro Umum
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)			30	387.074.027,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	4	4	2.188.213.550,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)		Biro Umum Sekretariat Daerah Biro Umum Sekretariat Daerah	4	208.754.000,00	Biro Umum
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			4	2.188.213.550,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0.00	3	4	288.850.810,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)		Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah	4	31.200.000,00	Biro Umum
		Koordinasi dan Penilaian BMD (Laporan)			4	288.850.810,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	6	6	454.446.990,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)		Biro Umum Sekretariat Daerah Biro Umum Sekretariat Daerah	6	52.506.019,73	Biro Umum
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD (Laporan)			6	454.446.990,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	72	72	120.098.061,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)		Biro Umum Sekretariat Daerah Biro Umum Sekretariat Daerah	72	31.200.000,00	Biro Umum

			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD (Laporan)			72	120.098.061,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	2	2	702.978.085,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)			Biro Umum Sekretariat Daerah		77.000.000,00	Biro Umum
			Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)			2	702.978.085,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah	2		
4.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	11	291.225.380,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)			Biro Umum Sekretariat Daerah		41.300.000,00	Biro Umum
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			11	291.225.380,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah	12		
4.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Persentase)			100	109.610.350,00	(Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas, SULAWESI BARAT)				100	61.800.000,00	Biro Umum
4.01.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	0.00	0.00	2	109.610.350,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)			Biro Umum Sekretariat Daerah	2	61.800.000,00	Biro Umum
			Analisa, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Retribusi (Dokumen)			2	109.610.350,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persentase)			100	1.368.794.689,00	(Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas, SULAWESI)				100	1.292.632.492,57	Biro Umum
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0.00	5	7	72.767.800,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)				7	220.572.492,57	Biro Umum
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)			7	72.767.800,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pimpinan, Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.00	1.00	10	138.853.650,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)			Pimpinan, Biro Umum Sekretariat Daerah	10.00	193.000.000,00	Biro Umum
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat, KGB, Setya Lencana, Karsi/Karsu, DUK, Usulan Pensiun, Usulan Cuti, SPMT, Karpeg, Penyesuaian Ijazah, Tapera (Dokumen)			11	138.853.650,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	27	1	1	194.677.050,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, SULAWESI BARAT)			Biro Umum Sekretariat Daerah	1	154.000.000,00	Biro Umum
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			1	194.677.050,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penawai						146.716.189,00				Biro Umum Sekretariat Daerah		133.060.000,00	Biro Umum



4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) Pengelolaan SKP, Absensi, Anjab, ABK, Peta Jabatan, Surat Teguran, PIP ASN (Dokumen)	75	7	7	146.716.189,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah	7		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	5	7	190.000.000,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah	7	92.000.000,00	Biro Umum
4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	240	250	625.780.000,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah	250	500.000.000,00	Biro Umum
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			250	625.780.000,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persentase)			100	10.568.885.843,00	(Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas, SULAWESI BARAT)			100	6.505.826.315,04	Biro Umum
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	11	4	1.088.451.518,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah	4	960.000.000,00	Biro Umum
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)			4	1.088.451.518,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	15	4	617.044.698,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah	4	162.000.000,00	Biro Umum
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)			4	617.044.698,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	2	4.599.090.921,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah	2	2.840.826.315,04	Biro Umum
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)			2	4.599.090.921,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	9	2	245.714.650,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah	2	300.000.000,00	Biro Umum
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)			2	245.714.650,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12	3.027.734.856,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah	12	920.000.000,00	Biro Umum
		Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			12	3.027.734.856,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					900.149.200,00			Biro Umum Sekretariat Daerah		1.190.000.000,00	Biro Umum

4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	340	340	12		(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)		Biro Umum Sekretariat Daerah	12		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			12	900.149.200,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1		(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)		Biro Umum Sekretariat Daerah	1	133.000.000,00	Biro Umum
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			1	90.700.000,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persentase)			100		(Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas, SULAWESI BARAT)			100	413.000.000,00	Biro Umum
4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7	12	4		(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)			5	207.000.000,00	Biro Umum
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)			4	35.503.000,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	7	7	6		(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)		Biro Umum Sekretariat Daerah	7	40.600.000,00	Biro Umum
4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Mebel (Paket)			20	11.500.000.000,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	12		(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)		Biro Umum Sekretariat Daerah	12	104.000.000,00	Biro Umum
4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			12	2.913.497.000,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	90	113	70		(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)		Biro Umum Sekretariat Daerah	70	61.400.000,00	Biro Umum
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)			70	500.000.000,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
		Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)			100		(Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas, SULAWESI BARAT)			100	3.237.501.132,95	Biro Umum
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5200	12	12		(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)			12	320.500.000,00	Biro Umum
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			12	439.686.948,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)		Biro Umum Sekretariat Daerah	12	1.745.000.000,00	Biro Umum

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)			12	2.253.554.551,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	1.046.293.184,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)			Biro Umum Sekretariat Daerah	1	1.172.001.132,95	Biro Umum
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Laporan)			1	1.046.293.184,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)			100	14.726.110.458,00	(Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas, SULAWESI BARAT)				100	2.298.327.732,99	Biro Umum
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	14	20	3.250.024.251,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)				20	1.250.172.137,00	Biro Umum
			Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)			20	3.250.024.251,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	110	110	120	3.663.942.433,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)				120	412.000.000,00	Biro Umum
			Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)			120	3.663.942.433,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	70	70	170	2.446.537.700,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)				170	106.000.000,00	Biro Umum
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			170	2.446.537.700,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	12	12	5.365.606.074,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI)				12	530.155.595,99	Biro Umum
			Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)			12	5.365.606.074,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Persentase)			100	1.286.756.487,00	(Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas, SULAWESI BARAT)				100	1.900.000.000,00	Biro Umum
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	1	2	239.619.917,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)				2	350.000.000,00	Biro Umum
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)			2	239.619.917,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						47.136.570,00				Biro Umum Sekretariat Daerah		180.000.000,00	Biro Umum

			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)		2	2	8		(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)			Biro Umum Sekretariat Daerah	8		
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)				8	47.136.570,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)		2.00	1	2	1.000.000.000,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)			Biro Umum Sekretariat Daerah		1.370.000.000,00	Biro Umum
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)				2	1.000.000.000,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah	2.00		
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Persentase)				100	12.331.212.154,00	(Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas, SULAWESI BARAT)				100	63.633.746.493,75	Biro Umum
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		300	5	5	3.832.575.767,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)				5	22.700.000.000,00	Biro Umum
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Paket)				5	3.832.575.767,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rumah Tangga Kepala Daerah			
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		300	5	5	2.299.545.460,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)			Rumah Tangga Kepala Daerah	5	12.833.746.493,75	Biro Umum
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Paket)				5	2.299.545.460,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)		400.00	5	10	6.199.090.927,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)			Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	10	28.100.000.000,00	Biro Umum
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (Paket)				10	6.199.090.927,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rumah Tangga Sekretariat			
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (Persentase)				100	10.191.169.869,00	(Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas, SULAWESI BARAT)				100	38.000.000.000,00	Biro Umum
4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan		Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)		200	271	210	183.007.000,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)				215	6.400.000.000,00	Biro Umum
			Penyiapan Materi Pimpinan (Dokumen)				210	183.007.000,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)		900	900	950	9.332.542.769,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)			Biro Umum Sekretariat Daerah	1000	22.000.000.000,00	Biro Umum
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)				950	9.332.542.769,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah			
4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)		2000	1400	1500	675.620.100,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)			Biro Umum Sekretariat Daerah	1600	9.600.000.000,00	Biro Umum

			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)				1.500	675.620.100,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah		
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan		Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan (Persentase)				100	4.715.257.687,00	(Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas, SULAWESI			100	12.500.000.000,00	Biro Umum
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	800	1000	1100		931.614.350,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI			1200	2.800.000.000,00	Biro Umum
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)			1.100		931.614.350,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Biro Umum Sekretariat Daerah		
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	0.00	12	12		2.682.803.037,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI BARAT)			12	3.000.000.000,00	Biro Umum
			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)			12		2.682.803.037,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tamu KDH dan WKDH		
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	0.00	900	1000		1.100.840.300,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI			1070	6.700.000.000,00	Biro Umum
			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)			900		1.100.840.300,00	(Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju, SULAWESI	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tamu KDH dan WKDH Biro Umum Sekretariat Daerah		
<b>J U M L A H</b>								<b>108.960.634.346,00</b>					<b>159.520.793.407,88</b>	